

**EVALUASI PROGRAM BERAS MISKIN DAERAH  
(RASKINDA) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KOTA BLITAR**

(Studi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**FAHMA NUR AINI**  
**NIM. 145030101111004**



**Dosen Pembimbing:**  
**Drs. Abdul Wachid, M.AP**  
**Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MALANG**  
**2018**

## MOTTO

*“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah tentang sikapnya yang mampu memberikan kebahagiaan terhadap orang lain dan dapat bermanfaat bagi orang lain ”*

**(Fahma Nur Aini)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN RASA HORMAT KUPERSEMBAHKAN SKRIPSIKU

KEPADA KEDUA ORANG TUAKU

AYAHANDA MUKAYANI

DAN IBUKU SUNDARI

ADIKKU ILMARTA ASMI

ORANG-ORANG YANG AKU SAYANGI

DAN ALMAMATER FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS

BRAWIJAYA MALANG



## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Studi  
pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)

Disusun Oleh : Fahma Nur Aini

NIM : 145030101111004

Fakultas : Ilmu Administrasi

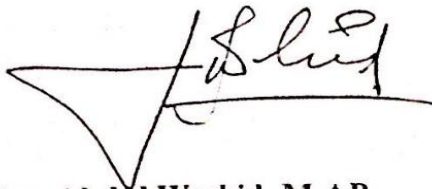
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 10 Desember 2018

### **Komisi Pembimbing**

Ketua



**Drs. Abdul Wachid, M.AP**

**NIP. 19561209 198703 1 008**

Anggota



**Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc**

**NIP. 19870426 201504 1 001**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 18 Desember 2018  
Waktu : 12.00 - 13.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Fahma Nur Aini  
Judul : Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Studi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)

Dan dinyatakan LULUS

## MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



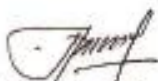
Drs. Abdul Wachid, M.AP  
NIP. 19561209 198703 1 008



Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc  
NIP. 19870426 201504 1 001

Anggota

Anggota



Dr. Siswidiyanto, MS  
NIP. 19600717 198601 1 002



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si  
NIP. 19690524 200212 2 002





## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Studi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-I) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 10 Desember 2018

  
MATERAI TEMPEL  
7BDD0AAFF434905527  
6000  
RUPIAH

145030101111004

## RINGKASAN

Fahma Nur Aini 2018, Evaluasi Program Beras Miskin Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Studi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). Drs. Abdul Wachid, M.AP dan Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc

Pemerintah Pusat memiliki komitmen mengenai kesejahteraan masyarakat yang merata untuk itu diadakan Program Raskin Pusat. Masih banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh bantuan Raskin Pusat sehingga Pemerintah Kota Blitar mengadakan Program Raskinda yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu yang tidak tercover oleh bantuan dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yaitu tidak tepatnya sasaran penerima. Masih terdapat masyarakat mampu yang mendapatkan Program Raskinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis evaluasi program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Serta Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendiskripsikan program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu analisis Miles, Huberman, dan Saldama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yaitu tidak tepatnya sasaran penerima Program Raskinda. Terdapat masyarakat yang tergolong mampu masih mendapat Program Raskinda. Hal tersebut tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurang mengertinya Ketua RT yang mendata Keluarga Penerima Manfaat, dan tidak adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar. Kemudian adanya program Raskinda tersebut memberikan kontribusi dan manfaat yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari Input sampai dengan dampak yang diberikan dari Program Raskinda dapat dikatakan bahwa Program Raskinda dapat dinilai baik meskipun masih terdapat sedikit masalah yang sebenarnya sudah diminimalisir oleh pihak yang berhubungan dengan program Raskinda.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan penulis adalah 1) Program Raskinda masih perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Blitar. 2) Memberikan pemahaman kepada warga masyarakat melalui RT/RW/kelurahan masing-masing bahwa program Raskinda diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu. 3) Perlunya kroscek data oleh petugas yang membidangi guna mendapatkan data yang konkrit dan akurat. 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap adanya perubahan data. 5) Pemerintah Kota Blitar Membuat Kriteria Penerima Raskinda secara pasti 6) perlu adanya pengawasan yang lebih mendalam lagi guna memantau perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Raskinda



## SUMMARY

Fahma Nur Aini 2018, Evaluation of the Regional Poor Rice Program in Order to Improve the Welfare of the Community of Blitar City (Study in the District of Sukorejo, Blitar City). Drs. Abdul Wachid, M.AP dan Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc

---

The Central Government has a commitment regarding the welfare of the community that is evenly distributed for the Central Raskin Program. There are still many poor people who have not been covered by the Raskin Center assistance so that the Blitar City Government holds a Raskinda Program that is intended for disadvantaged people who are not covered by assistance from the central government. In its implementation there are still problems, namely the inaccurate target of the recipient. There are still capable people who get the Raskinda Program. The purpose of this study was to find out, describe, and analyze the evaluation of the Regional Poor Rice program (Raskinda) in improving the welfare of the people of Blitar City. And to find out, analyze, and describe the Poor Regional Rice program (Raskinda) in improving the welfare of the people of Blitar City.

This study uses a type of descriptive research with a type of qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. Techniques for collecting data through interviews, observation, and documents. Data analysis used was analysis of Miles, Huberman, and Saldama.

The results of the study show that there are problems, namely the inaccurate target of the recipient of the Raskinda Program. There are people who are classified as able to still get the Raskinda Program. This is not in accordance with the targets set by the Blitar City Government. The problem was caused by lack of understanding of the Head of the RT who recorded the Family of Beneficiaries, and the lack of direct supervision carried out by the Blitar City Government. Then the existence of the Raskinda program provides positive contributions and benefits in improving people's welfare. Judging from the input to the impact provided by the Raskinda Program, it can be said that the Raskinda Program can be judged to be good even though there are still a few problems that have actually been minimized by parties related to the Raskinda program.

Based on the results of the study, the suggestions given by the author are 1) the Raskinda program still needs to be implemented in order to improve the welfare of the poor in Blitar City. 2) Providing understanding to community members through their respective RT / RW / kelurahan that the Raskinda program is intended for people who cannot afford it. 3) The need to check data by the officer in charge in order to get concrete and accurate data. 4) Coordinating with relevant agencies to verify and validate data changes. 5) The Blitar City Government makes certain Raskinda Recipient Criteria 6) It is necessary to have more in-depth supervision to monitor developments in the level of community welfare.

Keywords: Evaluation, Raskinda

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Studi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya MDA, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Pertama
5. Bapak Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol, Sc, selaku Dosen Pembimbing Kedua.
6. Bapak Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik

7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama ini telah memberikan keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Untuk seluruh sahabatku ALAYERS (Aprilia Kurnia Sari, Delly Elsavina, Reka April Ria Christanti, Taqwimi) dan MENANTU IDAMAN (Pegi Ayu Irana Dewi, Neny Ariyani, Retna Rifatul Asisah, Erna Ratna sari) yang selalu memberi dukungan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Anang Setiawan, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesra Kota Blitar.
10. Bapak Jito Baskoro, S.Sos selaku Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Blitar.
11. Ibu Lilik Hariyani, SE selaku Kasi Perekonomian dan Kersra Kecamatan Sukorejo.
12. Seluruh warga penerima Raskinda Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.
13. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 7 Desember 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                             | Halaman       |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>MOTTO .....</b>                          | <b>i</b>      |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>            | <b>ii</b>     |
| <b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>      | <b>iii</b>    |
| <b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>        | <b>iv</b>     |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b> | <b>v</b>      |
| <b>RINGKASAN .....</b>                      | <b>vi</b>     |
| <b>SUMMARY .....</b>                        | <b>vii</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>viii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                      | <b>x</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                   | <b>xiii</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                   | <b>xiv</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                | <b>xv</b>     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                     | 1             |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 13            |
| C. Tujuan Penelitian.....                   | 13            |
| D. Manfaat Penelitian.....                  | 13            |
| E. Sistematika Penulisan.....               | 15            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <br><b>17</b> |
| A. Administrasi Publik.....                 | 17            |
| B. Konsep Kebijakan Publik.....             | 19            |
| a. Pengertian Kebijakan Publik.....         | 19            |
| b. Tahapan Kebijakan Publik.....            | 21            |
| C. Evaluasi Program.....                    | 23            |
| a. Pengertian Evaluasi.....                 | 23            |
| b. Pengertian Evaluasi Program.....         | 26            |
| c. Tujuan Evaluasi Program.....             | 28            |
| d. Model dan Tahapan Evaluasi Program.....  | 30            |
| D. Masyarakat Miskin.....                   | 35            |
| a. Pengertian Masyarakat Miskin.....        | 35            |
| b. Klasifikasi Masyarakat Miskin.....       | 35            |
| c. Kriteria Masyarakat Miskin.....          | 37            |
| E. Kesejahteraan Masyarakat.....            | 38            |
| a. Pengertian Kesejahteraan.....            | 38            |
| b. Tujuan Kesejahteraan.....                | 41            |
| c. Indikator Kesejahteraan.....             | 42            |
| F. Program Raskinda.....                    | 46            |
| a. Program Raskinda.....                    | 46            |
| b. Dasar Hukum Raskinda.....                | 48            |

|                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| c. Tujuan dan Sasaran.....                                                                          | 49             |
| d. Perencanaan dan Penganggaran.....                                                                | 50             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                                               | <b>51</b>      |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                            | 51             |
| B. Fokus Penelitian.....                                                                            | 52             |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian.....                                                                 | 54             |
| D. Sumber dan Jenis Data.....                                                                       | 55             |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                     | 56             |
| F. Instrumen Penelitian.....                                                                        | 60             |
| G. Analisis Data.....                                                                               | 60             |
| H. Keabsahan Data.....                                                                              | 63             |
| <br><b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                         | <br><b>64</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                             | 64             |
| a. Kondisi Geografi dan Topologi.....                                                               | 64             |
| b. Kondisi Kependudukan.....                                                                        | 66             |
| c. Tugas dan Fungsi.....                                                                            | 67             |
| d. Struktur Kepegawaian.....                                                                        | 69             |
| B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....                                                         | 70             |
| 1. Proses Evaluasi Program Raskinda di Kota Blitar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat..... | 70             |
| a. Indikator Masukan ( <i>Input</i> ).....                                                          | 70             |
| b. Proses ( <i>Process</i> ).....                                                                   | 75             |
| c. Keluaran ( <i>Output</i> ).....                                                                  | 84             |
| d. Indikator Dampak ( <i>Outcome</i> ).....                                                         | 88             |
| 2. Program Raskinda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....                                | 90             |
| a. Mempunyai Pendapatan.....                                                                        | 91             |
| b. Terpenuhi Pangan.....                                                                            | 92             |
| c. Kesehatan.....                                                                                   | 93             |
| d. Pendidikan.....                                                                                  | 95             |
| C. Analisis Data.....                                                                               | 96             |
| 1. Proses Evaluasi Program Raskinda di Kota Blitar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat..... | 96             |
| a. Indikator Masukan ( <i>Input</i> ).....                                                          | 96             |
| b. Proses ( <i>Process</i> ).....                                                                   | 99             |
| c. Keluaran ( <i>Output</i> ).....                                                                  | 101            |
| d. Indikator Dampak ( <i>Outcome</i> ).....                                                         | 114            |
| 2. Indikator Program Raskinda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....                      | 105            |
| a. Meningkatkan Pendapatan.....                                                                     | 105            |
| b. Terpenuhi Pangan.....                                                                            | 106            |
| c. Kesehatan.....                                                                                   | 107            |
| d. Pendidikan.....                                                                                  | 109            |
| <br><b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                       | <br><b>111</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                  | 111            |



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| B. Saran.....               | 116        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>118</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b> | <b>121</b> |





## DAFTAR TABEL

| No.                                                                                  | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017..... | 6       |
| 2. Jumlah Penerima Raskinda Kota Blitar.....                                         | 10      |
| 3. Kriteria Evaluasi.....                                                            | 33      |
| 4. Daftar Kelurahan di Kecamatan Sukorejo.....                                       | 66      |
| 5. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Sukorejo Tahun 2015-2017.....          | 85      |



## DAFTAR GAMBAR

| No                                             | Halaman |
|------------------------------------------------|---------|
| 1. Analisis Data Model Interaktif.....         | 61      |
| 2. Peta Kecamatan Sukorejo.....                | 65      |
| 3. Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo..... | 70      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No                           | Halaman |
|------------------------------|---------|
| 1. Surat Penelitian.....     | 121     |
| 2. Instrumen Penelitian..... | 129     |
| 3. Dokumentasi Peneliti..... | 133     |
| 4. Curriculum Vitae.....     | 136     |









## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap negara di muka bumi ini tidak ada yang melewatkan pembangunan. Pembangunan sudah menjadi bagian dari proses terbentuknya peradaban manusia. Sejalan dengan pernyataan ini, definisi pembangunan sosial menurut Conyers (Soetomo, 2006: 312) adalah sebagai pembangunan yang dilakukan dari dan oleh rakyat. Dalam pengertian yang lain khusus pembangunan sosial dapat diartikan sabagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pengertian pembangunan sosial menurut Sumarno Nugroho dalam Soetomo (2006:312) yang diambil dari rumusan *Pre Conference Working Party* dari International Conference of Sosial Welfare. Dalam rumusan tersebut, pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi-relasi social dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal itu. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pembangunan sosial memberi perhatian kepada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosial mereka. Rumusan tersebut termasuk pengertian pembangunan sosial yang memiliki cakupan yang cukup luas.

Konsep pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita negara Kesejahteraan (Welfare State). Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini, senantiasa diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang meliputi 5 (lima) sasaran pokok yaitu: pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan infrastruktur. Dalam implementasinya, prioritas utama pembangunan nasional diberikan kepada pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial. Sasaran yang hendak dicapai melalui prioritas ini antara lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Pelaksanaan pembangunan tersebut sangat diharapkan oleh berbagai lapisan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin.

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena ketersediaan dana. Lingkup permasalahan kesejahteraan dewasa ini semakin kompleks baik

karena adanya faktor struktur penduduk, maupun faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan. Selanjutnya program kesejahteraan rakyat bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusuhan (konflik etnis/suku/agama), pelaksanaan otonomi daerah, masalah perbatasan, dan disintegritas mealikan juga untuk mengatasi dan memerangi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembangunan hingga saat ini. Kemiskinan tercermin dari belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak atas pangan, kesehatan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, tanah, sumber daya alam, air bersih, dan sanitasi, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan proses pembangunan. Definisi kemiskinan menurut Kecuk Suhariyanto (2011) dalam Syawie (2011: 213) kemiskinan adalah sebagai kondisi saat seseorang atau kelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang martabat. Lebih lanjut Kecuk Suhariyanto (2011) menjelaskan dalam Syawie (2011: 213) definisi kemiskinan mengalami penyempitan makna hanya dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Konsep ini sejalan dengan konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan

yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan dampak dari kemiskinan yaitu jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses terhadap pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya tabungan, dan tidak adanya investasi, dan tidak adanya perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara terbatas. Hal ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan kronis dalam proses pembangunan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejala semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kemiskinan merupakan problematika yang dihadapi oleh hampir setiap Negara, seperti halnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang juga tidak luput dari masalah kemiskinan. Di Indonesia angka kemiskinan masih terbilang sangat tinggi, meskipun BPS setiap tahunnya merilis data yang

menyatakan bahwa angka penduduk miskin di Indonesia menurun, namun hal tersebut bukan berarti bahwa Indonesia mengalami perbaikan secara signifikan karena penurunan angka kemiskinan tersebut. Tercatat pada tahun 2014, WEF mengumumkan bahwa peringkat daya saing Indonesia di bandingkan beberapa Negara ASEAN berada di posisi 38.

Berdasarkan sumber Tempo.co, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Menurut Kepala BPS Suhariyanto, angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Meski secara presentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan.

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia dengan Ibu kotanya yang terletak di Surabaya. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. berdasarkan laporan BPS tahun 2015, Jawa Timur adalah Provinsi yang menyumbangkan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 4,7 juta jiwa. Bahkan daerah penghasil migas seperti Bojonegoro pun masuk peringkat ke- 9 daerah termiskin di Jawa Timur. Berikut data penduduk miskin di Jawa Timur Tahun 2012 hingga 2017.



Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2017

| Kode       | Kabupaten/Kota   | Jumlah Penduduk Miskin (000) |          |          |          |          |          |
|------------|------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |                  | 2012                         | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
| 3501       | Kab. Pacitan     | 94.50                        | 91.70    | 88.90    | 92.08    | 85.53    | 85.26    |
| 3502       | Kab. Ponorogo    | 101.40                       | 103.00   | 99.90    | 103.22   | 102.06   | 99.03    |
| 3503       | Kab. Trenggalek  | 96.90                        | 92.80    | 90.00    | 92.17    | 91.49    | 89.77    |
| 3504       | Kab. Tulungagung | 94.60                        | 91.70    | 89.00    | 87.37    | 84.35    | 82.80    |
| 3505       | Kab. Blitar      | 121.60                       | 120.30   | 116.70   | 114.12   | 113.51   | 112.93   |
| 3506       | Kab. Kediri      | 209.00                       | 202.70   | 196.80   | 199.38   | 197.43   | 191.08   |
| 3507       | Kab. Malang      | 275.50                       | 288.60   | 280.30   | 292.87   | 293.74   | 283.96   |
| 3508       | Kab. Lumajang    | 126.40                       | 124.40   | 120.70   | 118.51   | 115.91   | 112.65   |
| 3509       | Kab. Jember      | 280.00                       | 278.50   | 270.40   | 269.54   | 265.10   | 266.90   |
| 3510       | Kab. Banyuwangi  | 157.20                       | 152.20   | 147.70   | 146.00   | 140.45   | 138.54   |
| 3511       | Kab. Bondowoso   | 118.50                       | 115.30   | 111.90   | 113.72   | 114.63   | 111.66   |
| 3512       | Kab. Situbondo   | 94.50                        | 90.30    | 87.70    | 91.17    | 89.68    | 88.23    |
| 3513       | Kab. Probolinggo | 248.50                       | 238.70   | 231.90   | 236.96   | 240.47   | 236.72   |
| 3514       | Kab. Pasuruan    | 179.10                       | 175.70   | 170.70   | 169.19   | 168.06   | 165.64   |
| 3515       | Kab. Sidoarjo    | 130.50                       | 138.20   | 133.80   | 136.13   | 136.79   | 135.42   |
| 3516       | Kab. Mojokerto   | 112.70                       | 116.60   | 113.30   | 113.86   | 115.38   | 111.79   |
| 3517       | Kab. Jombang     | 149.60                       | 137.50   | 133.50   | 133.75   | 133.32   | 131.16   |
| 3518       | Kab. Nganjuk     | 136.10                       | 140.80   | 136.50   | 132.04   | 127.90   | 125.52   |
| 3519       | Kab. Madiun      | 91.80                        | 83.70    | 81.20    | 84.74    | 85.97    | 83.43    |
| 3520       | Kab. Magetan     | 71.80                        | 76.30    | 74.00    | 71.16    | 69.24    | 65.87    |
| 3521       | Kab. Ngawi       | 131.70                       | 127.50   | 123.20   | 129.32   | 126.65   | 123.76   |
| 3522       | Kab. Bojonegoro  | 203.90                       | 196.80   | 190.90   | 193.99   | 180.99   | 178.25   |
| 3523       | Kab. Tuban       | 202.70                       | 196.90   | 191.10   | 196.59   | 198.35   | 196.10   |
| 3524       | Kab. Lamongan    | 197.90                       | 192.00   | 186.10   | 182.64   | 176.92   | 171.38   |
| 3525       | Kab. Gresik      | 174.40                       | 171.60   | 166.90   | 170.76   | 167.12   | 164.08   |
| 3526       | Kab. Bangkalan   | 229.80                       | 218.30   | 212.20   | 216.23   | 205.71   | 206.53   |
| 3527       | Kab. Sampang     | 253.40                       | 248.20   | 239.60   | 240.35   | 227.80   | 225.13   |
| 3528       | Kab. Pamekasan   | 160.80                       | 153.70   | 148.80   | 146.92   | 142.32   | 137.77   |
| 3529       | Kab. Sumenep     | 232.20                       | 225.50   | 218.90   | 216.84   | 216.14   | 211.92   |
| 3571       | Kota Kediri      | 22.30                        | 22.80    | 22.10    | 23.77    | 23.64    | 24.07    |
| 3572       | Kota Blitar      | 9.10                         | 10.10    | 9.80     | 10.04    | 9.97     | 11.22    |
| 3573       | Kota Malang      | 43.50                        | 41.00    | 40.60    | 39.10    | 37.03    | 35.89    |
| 3574       | Kota Probolinggo | 24.30                        | 19.20    | 19.00    | 18.66    | 18.37    | 18.23    |
| 3575       | Kota Pasuruan    | 15.10                        | 14.60    | 14.20    | 14.52    | 14.93    | 14.85    |
| 3576       | Kota Mojokerto   | 8.00                         | 8.30     | 8.00     | 7.72     | 7.24     | 7.28     |
| 3577       | Kota Madiun      | 9.30                         | 8.70     | 8.50     | 8.55     | 9.05     | 8.70     |
| 3578       | Kota Surabaya    | 175.70                       | 169.40   | 164.40   | 165.72   | 161.01   | 154.71   |
| 3579       | Kota Batu        | 8.70                         | 9.40     | 9.10     | 9.43     | 9.05     | 8.77     |
| JAWA TIMUR |                  | 4 992.70                     | 4 893.00 | 4 748.40 | 4 789.12 | 4 703.30 | 4 617.01 |



*Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (BPS Jatim 2017)*

Berdasarkan data BPS Jatim diatas, Kota Blitar merupakan salah satu wilayah yang mengalami masalah kemiskinan. Kota Blitar adalah salah satu kota yang berada di Jawa Timur, merupakan kota terkecil kedua setelah Mojokerto, yang memiliki luas wilayah hanya sebesar 32,58 KM<sup>2</sup> atau hanya sebesar 0,068% dari luas wilayah keseluruhan Provinsi Jawa Timur, yang dihuni sekitar 146,155 pada tahun 2015. Kota Blitar memiliki 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sukorejo.

Upaya meningkatkan aksesibilitas pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial, pemerintah pusat telah melaksanakan program penanganan masalah rawan pangan melalui penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di masing-masing daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Program Raskin Pusat bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para penerima manfaat Raskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Melalui Prgram Raskin ini, para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) menerima Raskin sebanyak 15kg/RTS/bulan dengan harga tebus 1.600,-/kg sselama 12 bulan melalui titik distribusi (kelurahan).

Perwujudan kebijakan penanggulangan kemiskinan (*Pro Poor*) melalui program Raskin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat tersebut, dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Blitar dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan pada tahun 2015. Hal tersebut sesuai dengan Visi Kota Blitar yaitu “Menuju masyarakat Kota Blitar sejahtera yang berkeadilan, berwawasan kebangsaan, dan religious melalui APBD Pro Rakyat pada tahun 2015”. Makna dari Visi tersebut adalah bahwa APBD Pro Rakyat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar, dan semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat, yang kesemuanya harus bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan kebijakan program tersebut, maka diarahkan pada pencapaian misi ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2011-2015 yaitu “Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan”. Misi tersebut mengandung makna bahwa penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek untuk semakin meningkatkan keberdayaan dan kemandirian keluarga miskin yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik terhadap program maupun pelakunya serta melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha termasuk masyarakat miskin dan PMKS lainnya. Sasaran utama dari misi tersebut adalah berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTS) dan PMKS lainnya, dengan arah kebijakan yang salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Blitar memiliki kesamaan mengenai program penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang dimaksud di atas, maka guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan untuk mendukung program Raskin Pusat (APBN) dimaksud, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kota Blitar kembali melanjutkan program Raskin Daerah yang diberikan kepada penerima manfaat secara GRATIS sebagai wujud implementasi APBD Pro rakyat. Program Raskin Daerah tersebut selain diperuntukkan bagi keluarga miskin dan fakir miskin yang belum tercover melalui program Raskin pemerintah pusat, juga diperuntukkan bagi para janda di Kota Blitar. Program Raskin Daerah ini dilaksanakan oleh karena daya beli masyarakat (miskin) di Kota Blitar yang memang masih rendah. Hal ini patut disadari mengingat harga-harga kebutuhan pokok saat ini semakin tinggi yang merupakan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang tentunya bagi masyarakat menengah ke bawah, hal tersebut menjadikannya sebagai beban utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Untuk itu, melalui program Raskin Daerah tahun 2015 ini Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan pemberian beras gratis sebanyak 10 kg/RTS/bulan selama 12 bulan yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan keluarga miskin termasuk para janda di Kota Blitar yang tidak masuk dalam daftar penerima manfaat program Raskin Pusat. Artinya, kebijakan pro poor yang diwujudkan Pemerintah Kota Blitar melalui program fasilitasi pemberian Raskin Daerah tersebut adalah dalam rangka memberikan kontribusi nyata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar guna menutupi kesenjangan antara data

rumah tangga sasaran yang bersumber dari hasil PPLS 2011-BPS dengan rumah tangga miskin dan fakir miskin yang riil di lapangan. Dengan terlaksananya fasilitasi pemberian Raskin Daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi keberlangsungan hidup rumah tangga sasaran penerima manfaat. Jumlah penerima Raskinda Kota Blitar dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2 Jumlah Penerima Raskinda Kota Blitar

| No | Tahun | Data RTS Pusat | Data RTS Kota Blitar |
|----|-------|----------------|----------------------|
| 1  | 2014  | 4.555          | 8.554                |
| 2  | 2015  | 4.555          | 12.986               |
| 3  | 2016  | 4.555          | 11.889               |
| 4  | 2017  | 4.555          |                      |

Jumlah penerima raskinda menurut Anang Setiawan, S.Sos Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Blitar mengatakan bahwa tahun 2015 tercatat 12.986 sasaran penerima Raskinda, dan pada tahun 2016 turun menjadi 11.889 sasaran yang tersebar di tiga kecamatan. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kepanjenkidul sebanyak 3.432 sasaran, Kecamatan Sananwetan 3.920 sasaran, dan wilayah Kecamatan Sukorejo sebanyak 4.537 sasaran. Kecamatan Sukorejo merupakan kecamatan yang paling banyak penerima Raskinda, oleh sebab itu peneliti memilih Kecamatan Sukorejo untuk diteliti.

Berdasarkan data penerima Beras Miskin Daerah (Raskinda) dari tujuh kelurahan se-Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2015 terdapat sekitar 4.869 sasaran. Bertambah banyak jika dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 3.219 pada tahun 2014. Tambahan itu terdiri sekitar 1.268 janda usulan baru dan 382 sasaran Keluarga Miskin (Gakin) baru. Bertambahnya jumlah penerima Raskinda tersebut sesuai harapan Walikota Blitar, diantara sasaran penerima Raskinda dari APBD Kota Blitar adalah para janda miskin dan warga miskin yang tidak tercover Raskin pusat. Dengan jumlah beras bantuan masing-masing 10 Kg/bulan yang diberikan tiga bulan sekali. Pada tahun 2016 jumlah penerima Raskinda turun menjadi 4.537 dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 4.459.

Program Beras Miskin Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Blitar, selama berjalannya waktu terdapat beberapa masalah. Salah satunya adalah tidak tepatnya sasaran yang telah ditentukan. Terdapat seribu orang yang seharusnya tidak menerima program tersebut. Seribu orang tersebut adalah janda mampu yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan tersebut dan orang yang sudah dianggap layak dan tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan, hal tersebut melanngar atau tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masalah tidak tepatnya sasaran penerima manfaat juga ada di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apakah memang benar ada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program tersebut, sehingga terdapat penurunan jumlah penerima bantuan di tahun 2016 menjadi 4.537 dan 2017 menjadi 4.459.



Pemerintah Kota Blitar mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya dengan adanya program bantuan beras bagi masyarakat miskin yang tidak tercover raskin pusat dan janda miskin. Melihat uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang evaluasi program beras miskin daerah dengan judul **“EVALUASI PROGRAM BERAS MISKIN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BLITAR (Studi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)”**





## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas,dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses evaluasi program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar?
2. Bagaimanakah indikator program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis evaluasi program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis, program Beras Miskin Daerah (Raskinda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
  - a) Berguna untuk menambah pengetahuan, kajian, dan pemahaman bagi pengembangan ilmu administrasi tentang Evaluasi Program, yaitu evaluasi program yang ada di Kota Blitar khususnya program Raskinda.

- b) Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa dimasa yang akan datang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Brawijaya Malang khususnya Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi publik.
- c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sesungguhnya yang ada di lapangan serta merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1).

## 2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah Kota Blitar dalam memberikan program yang tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat meningkatkan program-programnya agar lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Blitar.
- b) Sebagai informasi bagi masyarakat Kota Blitar agar mereka tau bagaimana jalannya program yang ada di Kota Blitar Khususnya Program Raskinda dan bagaimana dampak dari program tersebut.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II                     TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian yang berkaitan dengan judul. Teori ini didapat dalam hasil studi kepustakaan beberapa literatur.

### **BAB III                    METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam metode penelitian ini dikemukakan fokus penelitian, lokasi, dan situs peneliti yang dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Blitar Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Kecamatan Sukorejo.

### **BAB IV                    HASIL DAN PEMBAHASAN**

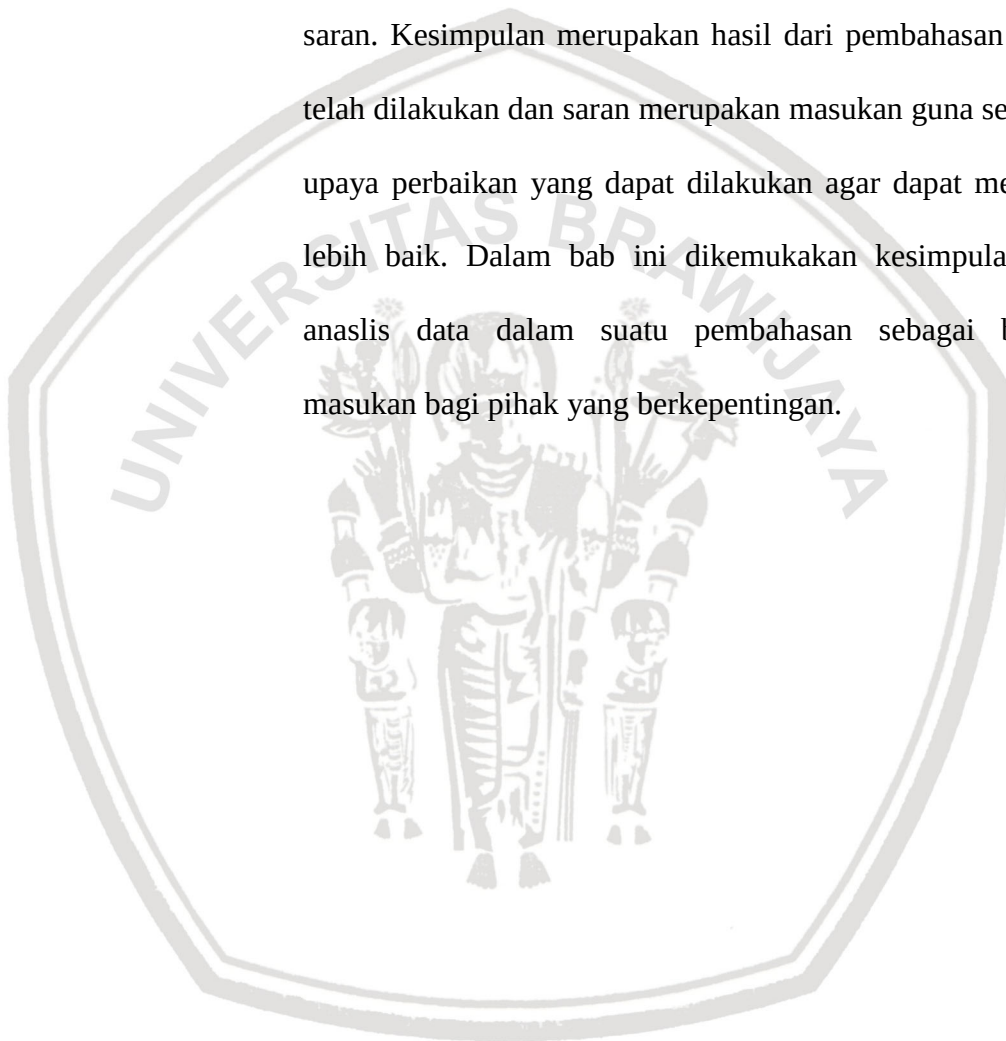
Bab ini menguraikan tentang data-data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian. Selain itu juga pada bab ini, terdapat gambaran umum lokasi dan situs

penelitian. Bab ini juga dimuat analisis terkait dengan hasil penelitian berdasarkan teori atau peraturan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran merupakan masukan guna sebagai upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar dapat menjadi lebih baik. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan atau analisis data dalam suatu pembahasan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

Istilah administrasi telah lama dikenal oleh masyarakat luas, karena banyak masyarakat yang secara tidak sadar menjalankan istilah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, biasanya berhubungan dengan pemerintahan tetapi saat ini istilah administrasi tidak hanya berhubungan dengan pemerintah saja melainkan juga dengan non pemerintah. Administrasi menurut Siagian dalam Pasolong (2007: 3) merupakan “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008: 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Kata publik dasarnya berasal dari bahasa Inggris *Public* yang mempunyai arti umum, rakyat, dan orang banyak. Menurut Syafi’I et. al dalam Pasolong (2007: 6) publik adalah “sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Menurut Chaddler dan Plano dalam Keban (2008: 4) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Pengertian administrasi publik dari beberapa ahli yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pemerintah yang menghasilkan barang dan jasa publik untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan kebijakan publik atau membuat program yang telah diorganisir dan dikoordinasikan untuk diimplementasikan dan dikelola sehingga kebijakan atau program tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.



## B. Konsep Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan memiliki banyak pengertian, menurut Suharto (2005: 7) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana, dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berkembang sebagai bidang studi multidisiplin sehingga sering disebut sebagai *policy sciences* (Hakim, 2011: 113). Banyak pengertian mengenai kebijakan publik. Jika dilihat dari bidang disiplin ilmu terdapat berbagai macam definisi kebijakan, baik itu secara luas maupun secara sempit.

Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002: 5), memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Sementara itu, Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn, menyampaikan definisi kebijakan yang relative spesifik, yaitu sebagai “*a purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan pemerintah (Suharto, 2005: 44).

Kebijakan merupakan suatu langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai pedoman guna menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anderson dalam Islamy menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok dalam memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2001: 17).

Pengertian kebijakan menurut Laswell dan Caplan yang dikutip oleh Islamy mengemukakan bahwa kebijakan adalah *a project program of goal, value, and practice* (Islamy, 2001: 15-17). Sedangkan menurut Chief J.O Udoji dalam Abdul Wahab (2001: 5), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Pengertian kebijakan juga dijelaskan oleh Easton (1969) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat (Hakim, 2011: 25). Dengan demikian, cukup pemerintah saja yang dapat melakukan suatu tindakan yang ditujukan untuk masyarakat dan tindakan tersebut merupakan pilihan yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Pengertian kebijakan publik yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik, yaitu:

- a) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
- b) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
- c) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, menontrol inflasi, atau

menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

- d) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negative. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negative, kebijakan public dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut pemerintah sangat diperlukan.
- e) Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah (Agustino, 2006:9)

Kebijakan publik dalam interpretasinya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis kebijakan. Jenis-jenis kebijakan dari sudut pandang Nugroho mendapat sudut pandang yang berbeda, dimana jenis-jenis kebijakan dibedakan berdasarkan sifatnya menurut Nugroho dalam Pasolong (2010: 40), kebijakan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

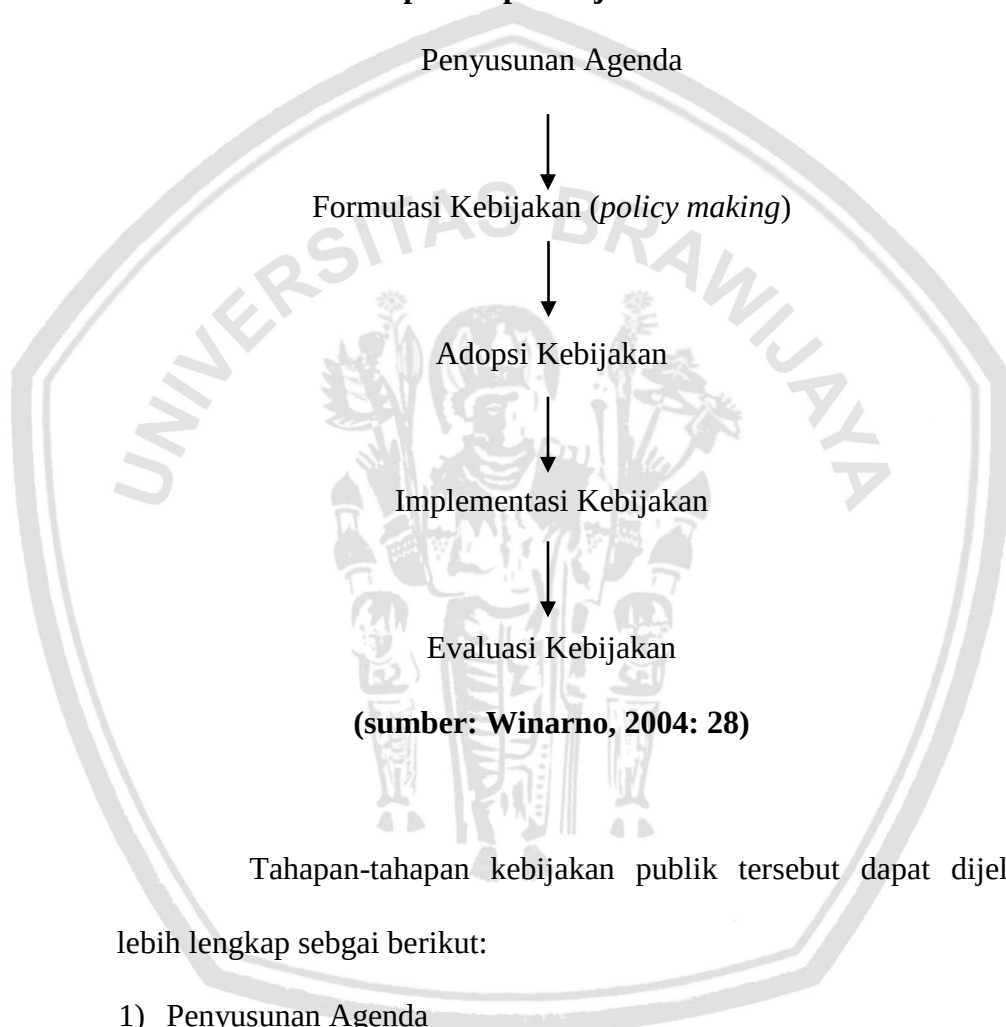
- 1) Kebijakan bersifat makro, yaitu kebijakan atau aturan yang bersifat umum.
- 2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan walikota.
- 3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota.

Berdasarkan dari beberapa pengertian mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik merupakan suatu langkah atau keputusan yang telah diambil oleh pemerintah yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

## b. Tahapan Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan berurutan. Dalam tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yang dapat digambarkan melalui gambar sebagai berikut:

### Tahap-Tahap Kebijakan Publik



(sumber: Winarno, 2004: 28)

Tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut dapat dijelaskan lebih lengkap sebagai berikut:

- 1) **Penyusunan Agenda**  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk agenda kebijakan perumusan kebijakan.
- 2) **Formulasi Kebijakan (*policy making*)**  
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut

berasal dari berbagai alternative yang ada. Pada tahap ini, masing-masing aktor “bersaing” untuk mengusulkan pemecahan masalah.

3) Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antaradirektur lembaga dan keputusan peradilan sehingga akan didapatkan satu kebijakan yang akan diambil dalam memecahkan permasalahan yang ada.

4) Implementasi Kebijakan

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana

5) Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat (Winarno, 2004: 28-30).

Tahapan-tahapan kebijakan publik merupakan sebuah rantai yang tidak terputus, namun merupakan suatu siklus yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisah antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tahapan-tahapan kebijakan tersebut sangat mempengaruhi dan berperan penting dalam pembuatan kebijakan yang baik, guna menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

### C. Evaluasi Program

#### a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.



Istilah evaluasi sudah menjadi kosakata dengan bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” yang berarti penilaian dan penaksiran (Arikunto dan Jabar, 2008: 27). Sedangkan menurut (Yunanda, 2010: 65) “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”.

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford *Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi adalah *find out, decide the amount of value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kat-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggungjawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan (Arikunto, 2010: 18).

Evaluasi digunakan untuk memastikan bahwa suatu program atau proyek yang telah dilaksanakan sudah mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Hikmat dalam (Arikunto dan Jabar, 2008: 3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas proyek. Definisi evaluasi lebih dipertegas lagi oleh (Griffin dalam Tilaar dan Nugroho, 2008: 69) menyatakan bahwa:

“Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian



didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil dengan criteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Pengertian lain mengenai evaluasi juga dijelaskan menurut Sudjana dalam Dimiyanti dan Mudjiono (2006: 191) bahwa, “dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu sebagai proses memebrikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan criteria tertentu”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan criteria, evaluator dapat langsung membandingkan namun dapat pula melakukan pengkuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkan dengan criteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Crawford dalam Dimayati dan Mudjiono (2006: 191) menjelaskan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau criteria yang telah ditentukan”.

Pengertian yang telah dijelaskan diatas mengenai evaluasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk mengetahui atau menilai apakah program yang telah dilaksanakan tersebut berhasil atau tidak. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dapat dicapai oleh program tersebut. Ada dua konsep keberhasilan yang terdapat di dalam suatu program, yaitu

efektifitas dan efisiensi dari program tersebut. (Echols dan Shadily, 2000: 76) menjelaskan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara output dan input nya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output suatu proses”.

#### **b. Pengertian Evaluasi Program**

Evaluasi program sangat penting dilaksanakan terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Maka dari itu penting untuk kita ketahui mengenai pengertian evaluasi program. Kedudukan evaluasi program dalam administrasi publik berada pada tahapan evaluasi kebijakan publik. Karena suatu kebijakan seringkali mencakup sejumlah program. Program dapat dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Pengertian evaluasi program menurut Tyler dalam Arikunto (2010: 38) adalah upaya untuk menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Kemudian menurut Arikunto dan Jabar (2008: 14) evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis dengan nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi program menurut Sutisna (2000: 250) bahwa:

“Evaluasi program adalah unsur lain yang penting dari keseluruhan proses pengelolaan kegiatan. Evaluasi program, pada umumnya berkaitan dengan usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Evaluasi program adalah proses yang menentukan betapa baiknya organisasi, program-program atau kegiatan-kegiatan sedang atau telah mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Dengan kata lain evaluasi program adalah membandingkan hasil-hasil

yang sebenarnya dengan yang dikehendaki dan merumuskan pendapat tentang perbuatan organisasi dan anggotanya didasarkan pada perbandingan itu”.

Pengertian evaluasi program juga dijelaskan oleh Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) dalam Arikunto dan Jabar (2004: 4) bahwa, evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Menurut pedoman evaluasi program yang diterbitkan direktorat ditjen PLS Depdiknas (2002: 2) evaluasi adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis, dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Evaluasi program dapat menunjukkan pencapaian suatu program pemerintah selama implementasi program. Evaluasi program menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari sebuah program yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan program selanjutnya dapat dikembangkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Penilaian yang dilakukan dengan melihat sejauh mana kesesuaian antara program dengan kegiatannya. Bagi pemerintah evaluasi yang dilakukan harus merujuk pada indikator yang telah ditetapkan *baik input, process, output, outcome, dan impact*.

Kerangka evaluasi diperlukan dalam suatu program. Kerangka evaluasi mengatur variable evaluasi menjadi tiga variable yaitu *input program, process, dan output program*.

### 1) *Input program*

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2010: 127), evaluasi *input* (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran tertentu.

### 2) *Process program*

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2010: 127), evaluasi proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*).

### 3) *Output program*

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2010: 127), evaluasi *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.

Berbagai definisi yang telah disebutkan diatas mengenai evaluasi program, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan program selanjutnya dapat dikembangkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

## c. Tujuan Evaluasi Program

Program yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan implementasi program yang telah dibuat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kunarjo (2002: 268)

yang menyatakan bahwa program yang telah selesai dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan program. Tujuan dari evaluasi juga dijelaskan oleh Wirawan (2011: 22-25) yaitu:

- 1) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat
- 2) Menilai tentang kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana program
- 3) Mengukur pelaksanaan program sesuai dengan standar
- 4) Mengidentifikasi dan menentukan dimensi program yang sudah berjalan dan yang tidak berjalan
- 5) Pengembangan staf program
- 6) Memenuhi ketentuan undang-undang
- 7) Akreditasi program
- 8) Mengukur cost efektifitas dan cost efisiensi
- 9) Mengambil keputusan mengenai program
- 10) Akuntabilitas
- 11) Memberikan umpan balik kepada pemimpin dan staf program
- 12) Memperkuat politik
- 13) Mengembangkan teori ilmu administrasi dan riset evaluasi.

Tujuan evaluasi program menurut Saphiro (2001: 6) mengungkapkan bahwa evaluasi program dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, menyarankan solusi yang mungkin untuk masalah, memunculkan pertanyaan tentang asumsi dan strategi, mendorong untuk memikirkan arah untuk mencapai tujuan, memberikan informasi dan wawasan, meningkatkan kemungkinan untuk membuat perbedaan perkembangan positif. Menurut Mark, Henry,



dan Julnes Iskandar (2012) dalam Iskandar (2012) ada empat tujuan evaluasi program, yaitu:

- a) Menilai kekuatan dan kelemahan program, mengembangkan penilaian terhadap nilai suatu kebijakan program pada level individu atau masyarakat.
- b) Peningkatan organisasi dan program, sebagai upaya menggunakan informasi secara langsung untuk memodifikasi dan meningkatkan pelaksanaan program.
- c) Menilai seberapa luas program sesuai dengan undang-undang, regulasi, aturan, dan harapan.
- d) Mengembangkan pengetahuan, menemukan atau menguji teori, preposisi dan hipotesa dalam lingkup kebijakan dan program.

Beberapa tujuan evaluasi yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi progam dapat digunakan sebagai tolak ukur antara rencana dengan hasil dari program, baik hasil yang dirasakan oleh pembuat program maupun yang dirasakan oleh sasaran dari program yang telah dilaksanakan. Selain itu tujuan dari evalusi program adalah untuk mendapatkan informasi maupun wawasan terkait masalah, solusi, hingga strategi yang dapat digunakan dalam suatu program.

#### **d. Model dan Tahapan Evaluasi Program**

Penjelasan mengenai model dan tahapan evaluasi program, menurut National Minority AIDS (2009: 20) menyatakan bahwa *“there are two major classification for program evaluation: formative and summative. Formative evaluation analysis of a program’s strengths and weaknesses to gain improvement. Summative evaluation measurements and/or judgements that allow conclusions to be drawn about the impact,*



*outcome or benefit of a program*”. Ada dua klasifikasi utama untuk evaluasi program yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven dalam Arikunto dan Jabar (2014: 42). Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi.

Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program berjalan (Arikunto dan Jabar, 2014: 42). Tujuan dari evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berjalan, sekaligus untuk mengidentifikasi hambatan yang dapat menyebabkan program tidak berjalan dengan lancar sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan secara dini dapat melakukan perbaikan program untuk mencapai tujuan semula. Evaluasi sumatif sendiri dilakukan pada waktu program sudah berakhir (Arikunto dan Jabar, 2014: 43). Tujuan dari evaluasi ini dilakukan untuk melakukan penelitian yang memungkinkan kesimpulan bisa ditarik tentang dampak, hasil atau manfaat dari program, dengan kata lain tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengukur ketercapaian program. Setelah menentukan obyek yang akan dievaluasi maka selanjutnya harus menentukan aspek-aspek dari obyek yang akan dievaluasi. Menurut Stake, 1967, Stufflebeam, 1959, Alkin 1969 (dalam Suharsimi, 2007) mengemukakan bahwa evaluasi berfokus pada empat aspek, yaitu:

- a) Konteks
- b) *Input*
- c) Proses implementasi
- d) Produk

Tujuan evaluasi program Menurut Beni Setiawan, (1999: 20) Direktorat pemantauan dan Evaluasi Bapenas, tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Menurut Beni Setiawan, (1999: 20) dimensi utama diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat dikur melalui empat dimensi:

- 1) Indikator masukan (*input*)
- 2) Proses (*process*)
- 3) Keluaran (*output*)
- 4) Indikator dampak (*outcome*)

Pengertian Evaluasi menurut Pietrk, dkk (1995) dalam Maraya (2011), dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Evaluasi masukan (*input*) berfokus pada beberapa bagian dan masukan program yang dapat mempengaruhi atau memperbaiki kinerja program, sehingga hasil yang diharapkan akan lebih baik.
2. Evaluasi proses (*process*), merupakan pengukuran sebuah lembaga dalam melaksanakan program dan melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen program serta merancang kembali suatu program.
3. Evaluasi hasil (*outcome*), merupakan evaluasi yang menenknkan pada dampak program secara keseluruhan pada sasaran dan tujuan program.

Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukan tahapan siklus pengelolaan program. Menurut Pariata Westra (1983: 46-47) terdapat tiga tahapan siklus pengelolaan program, yaitu:

1. Evaluasi Pra-program (*ex-ante evaluation*)  
Dilaksanakan sebelum program diimplementasikan, hal ini dilaksanakan untuk menaksir kebutuhan atau pernyataan kebutuhan pembangunan yang bersangkutan, atau untuk menentukan sasaran potensial dari suatu program pembangunan per-kelompok atau perregion.
2. Evaluasi tengah berlangsung (*on going/concurrent evaluation*)  
Dilakukan pada saat program itu diimplementasikan, jadi pada tahap tenggang waktu itu berjalan dievaluasi.
3. Evaluasi setelah nerlangsung (*ex-post evaluastion*)  
Dilakukan setelah program itu diimplementasikan untuk menilai dampak dan pengaruh program itu dengan menghitung seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program itu.

Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selanjutnya terdapat perbedaan metodologi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu: penilaian indikator kinerja program berdasarkan keluaran dan hasil dan studi evaluasi program berdasarkan dampak yang timbul. Cara pertama dilakukan melalui perbandingan indikator kinerja sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi yang relevan dan cukup harus tersedia dengan mudah sebelum suatu indikator kinerja program dianggap layak. Cara yang kedua dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat mendalam terhadap hasil, manfaat, dan dampak dari program yang telah selesai dilaksanakan.

Menilai dan mengukur keberhasilan sebuah program diperlukan beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan. Indikator tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan penilaian dan pengukuran keberhasilan sebuah program. Dalam bukunya, Dunn (2000: 610) mengungkapkan beberapa kriteria dalam evaluasi, yang dipaparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kriteria Evaluasi

| No<br>(1) | Kriteria<br>(2) | Pertanyaan<br>(3)                                                                             | Ilustrasi<br>(4)                                       |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1         | Efektifitas     | Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?                                                  | Unit pelayanan                                         |
| (1)       | (2)             | (3)                                                                                           | (4)                                                    |
| 2         | Efisiensi       | Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?                   | Unit biaya, manfaat bersih, rasio biaya manfaat        |
| 3         | Kecukupan       | Seberapa jauh pencapaiannya hasil yang diinginkan memecahkan masalah?                         | Seberapa jauh pencapaiannya efektifitas tetap          |
| 4         | Pertaan         | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok berbeda?               | Kriteria pareto, kriteria kaldor-hicks, kriteria rawls |
| 5         | Responsifitas   | Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok sendiri? | Konsistensi dengan survey warga Negara                 |
| 6         | Ketepatan       | Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?                      | Program publik harus merata dan bernilai               |

Sumber: William Dunn (2000: 610)

Kriteria evaluasi menurut Orville F. Poland dalam Soekarno (2005: 223), yaitu:

1. *Effectiveness evaluation*, evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program
2. *Efficiency evaluation*, evaluasi terhadap efesiensi pelaksanaan. Evaluasi inilah yang oleh Anderson dimaksudkan dengan melihat pada “cost-benefit ratio”.

3. *Ecletic evaluation*, evaluasi yang meneliti pemasukan, proses, kriteria-kriteria hasil kegiatan yang dianggap ada kaitannya dengan hasil program.

Berdasarkan beberapa penjabaran yang telah di paparkan diatas maka peneliti ingin menggunakan evaluasi hasil atau tujuan setelah pelaksanaan program dengan melihat dampak, perubahan, dan manfaat dari program yang telah dilaksanakan tersebut. Sementara itu, untuk menilai dan mengukur keberhasilan pelaksanaan program peneliti akan menggunakan kriteria evaluasi Dunn sebagai tolak ukur keberhasilan program yaitu efektivitas program, efesiensi program, kecakupan program, responsivitas program, ketepatan program, dan pemerataan program.

#### **D. Masyarakat Miskin**

##### **a. Pengertian Masyarakat Miskin**

Kemiskinan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pengertian kemiskinan dewasa ini telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak hanya dipandang dari dimensi ekonomi saja, melainkan semakin meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan bahkan politik. Pengertian Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tdk menentu yang mencakup seluruh multidimensi,



yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi asset (P2 KP, Pedoman Umum, 2004: 1)

#### **b. Klasifikasi Masyarakat Miskin**

Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Masyarakat yang termasuk kedalam kemiskinan absolut adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya. Sedangkan masyarakat yang masuk kedalam kriteria kemiskinan relatif adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relative mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Klasifikasi kemiskinan lainnya dibedakan menjadi natural, cultural, dan structural. Kemiskinan natural sama pengertiannya dengan kemiskinan turun temurun, disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi suatu masyarakat sehingga sulit melakukan perubahan. Pengertian kemiskinan cultural adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi masyarakat, disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup, diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan pengertian kemiskinan structural adalah suatu kemiskinan yang melanda suatu



komunitas yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun manusia. Faktor-faktor tersebut muncul karena dibangun dan dikondisikan oleh manusia, sehingga menyebabkan kerugian pada suatu sisi (Sulistiyani, 2004: 29-39).

**c. Kriteria Masyarakat Miskin**

Menentukan masyarakat masuk dalam kategori miskin atau tidak ada kriterianya. Menurut Badan pusat Statistik, terdapat beberapa indikator kemiskinan di Indonesia untuk menentukan keluarga penerima manfaat (KPM). Indikator-indikator tersebut antara lain (Badan Pusat Statistik, 2008: 33):

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang;
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunana, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.00,- (Enam ratus ribu rupiah);
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.00,- (Lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

## **E. Kesejahteraan Masyarakat**

### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan impian bagi seluruh manusia yang ada di dunia, baik mereka yang hidup dikota maupun yang hidup di desa. Hampir semua orang yang ada mempunyai keinginan untuk hidup yang layak dan sejahtera, dengan mempunyai keinginan tersebut masyarakat akan bekerja dengan lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar bisa mencapai kesejahteraan. Secara umum kita mengetahui bahwa kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi kehidupan yang baik dan layak dimana kondisi yang sudah terpenuhinya segala bentuk kebutuhan yang diperlukan, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Fungsi dan tujuan Negara Indonesia, salah satunya memajukan kesejahteraan umum seperti yang ada didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia”. Dari hal tersebut maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan mengandung arti yang sangat luas, menurut J. Hellin dan L. Gonjales dalam Kirdi Dipoyudo 1985: 12 menyatakan:

“Kesejahteraan ialah suatu keadaan dimana kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan wajar secara mantap atau terus-menerus. Secara kongkrit berarti tersediannya barang dan jasa kebutuhan hidup, tidak hanya untuk memungkinkan hidup tetapi juga untuk mempermudah, menyenangkan, dan meningkatkannya, sehingga orang-orang dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri, dan mencapai kesejahteraan.”

Pengertian kesejahteraan menurut Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 794) berasal dari kata “sejahtera” yang

berarti aman, sentosa, selamat (terbebas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan lain sebagainya). Apabila hal tersebut sudah terlaksana maka akan mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial menurut Puspitosari, dkk (2011:49) adalah:

“Pengertian kesejahteraan umum adalah suatu kondisi tertentu yang dirasakan oleh publik mengenai kehidupannya yang baik dan berkeadilan. Kondisi publik yang sejahtera dapat dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang bebas dari perasaan lapar, kemiskinan, kecemasan akan hari esok, perasaan takut, dari penindasan dan dari ketidakadilan. Kesejahteraan publik dapat juga dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang aman, tentram, kehidupan publik, yang sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri, bebas mengekspresikan dan mewujudkan kehidupan individu dan sosialnya sesuai aspirasi serta kemungkinan yang tersedia dalam masyarakatnya. Dengan demikian, kesejahteraan publik ditentukan oleh aspirasi dan perasaan manusia itu sendiri terhadap kehidupan individual maupun sosialnya”.

Seorang individu atau kelompok dapat mencapai hidup yang sejahtera, dan dapat memenuhi kehidupan pribadi dan keluarganya, maka akan terwujud kesejahteraan sosial. Menurut Friedlander dalam Suud (2006: 8) menjelaskan kesejahteraan sosial adalah:

“Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan hubungan personal dan sosial yang member kesempatan kepada mereka untuk mempertimbangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.”

Pengertian kesejahteraan yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah keadaan dimana seorang individu atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus dan merasa aman sentosa dan bebas mengekspresikan dan

mewujudkan kehidupan individu dan sosialnya. Sedangkan pengertian Kesejahteraan Sosial dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Bab 1 Ketentuan Umum, “Kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri hingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

#### **b. Tujuan Kesejahteraan**

Tujuan kesejahteraan social menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi social dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan social masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab social dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan social secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan social.

Kesejahteraan sosial menurut Migley dalam artikel Abraham Fanggidae: Implikasi UU Kesejahteraan Sosial, kondisi kesejahteraan



social mencerminkan tiga elemen dasar, yaitu “ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya, jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup layak, jika masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya”.

### c. Indikator Kesejahteraan

Kehidupan yang diimpikan oleh seluruh manusia adalah kesejahteraan, baik kesejahteraan dalam hal lahir maupun batin. Namun pada kenyataannya kehidupan yang dijalani oleh manusia tidaklah selalu dalam kondisi sejahtera. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Kesejahteraan meliputi seluruh kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, social, budaya, iptek, pertahanan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut merupakan jangkauan pelayanan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menentukan bahwa manusia tersebut hidup sejahtera atau tidak maka diperlukan indicator kesejahteraan. Ukuran sebagai penentu tingkat kesejahteraan suatu masyarakat yang umum digunakan menurut Ritomo dan Sumardi dan Evers (1982: 43) adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai pendapatan
- b. Terpenuhiya pangan
- c. Keadaan rumah
- d. Terpenuhiya sandang
- e. Kesehatan
- f. Pendidikan



Indikator kesejahteraan juga dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan hidup dapat diukur melalui:

1. Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya;
2. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan keluarga juga dijelaskan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Prasejahtera (sangat miskin)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

1. Makan 2 kali sehari
2. Memiliki pakaian berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah, dll)
3. Tingkat kesehatan yang selalu dijaga
4. Rumah yang layak huni
5. Lingkungan bersih dan sehat

b. Keluarga Sejahtera I

Dapat memenuhi satu atau lebih indikator yang meliputi:

1) Indikator Ekonomi

- a. Paling tidak keluarga makan 3 kali sehari
- b. Setahun sekali paling kurang seluruh keluarga memperoleh pakaian yang baru
- c. Luas lantai rumah paling tidak mencukupi untuk aktivitas sehari-hari

2) Indikator Non Ekonomi

- a. Ibadah teratur
- b. Sehat tiga bulan terakhir
- c. Punya penghasilan tetap
- d. Anak lebih dari 2 orang, ber-KB
- e. Anak sekolah terpenuhi pendidikannya
- c. Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya yang meliputi:

- 1. Memiliki tabungan keluarga
- 2. Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3. Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- 4. Meningkatkan pengetahuan agama
- 5. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- 6. Menggunakan sarana transportasi

d. Keluarga Sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

- 1. Memiliki tabungan keluarga
- 2. Makan bersama sambil berkomunikasi

3. Mengikuti kegiatan masyarakat
4. Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
5. Meningkatkan pengetahuan agama
6. Menggunakan sarana transportasi
7. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah

Beberapa indikator yang telah dijelaskan diatas mengenai kesejahteraan, maka dapat disimpulkan dan sesuai dengan perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi criteria berikut:

- 1) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, social maupun agama;
- 2) Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga; dan
- 3) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan msyarakat sekitar, beribadah khusus di samping terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator kesejahteraan dapat diketahui mengenai indikator atau ukuran mengenai keluarga yang sejahtera yang jelas. Indikator dan ukuran diatas dapat digunakan sebagai ukuran bagi masyarakat yang kurang sejahtera sehingga layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

## F. Program Raskinda

### a. Program Raskinda

Upaya meningkatkan aksesibilitas pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial, pemerintah pusat telah melaksanakan program penanganan masalah rawan pangan melalui penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di masing-masing daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Perwujudan kebijakan penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) melalui program Raskin yang telah dilaksanakan pemerintah pusat tersebut, dinilai sangat relevan dan sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Blitar dalam menuntaskan penanggulangan permasalahan kemiskinan pada tahun 2015.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana di atas, maka guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan untuk mendukung program Raskin Pusat (APBN) dimaksud, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kota Blitar kembali melanjutkan program Raskin Daerah yang diberikan kepada penerima manfaat secara GRATIS sebagai wujud implementasi APBD Pro rakyat. Program Raskin Daerah tersebut selain diperuntukkan bagi keluarga miskin dan fakir miskin yang belum tercover melalui program Raskin pemerintah pusat, juga diperuntukkan bagi para janda di Kota Blitar. Program Raskin Daerah ini dilaksanakan oleh karena daya beli masyarakat (miskin) di Kota Blitar yang memang masih rendah.

Untuk itu Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan pemberian beras gratis sebanyak 10 kg/RTS/bulan selama 12 bulan yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan keluarga miskin termasuk para janda di Kota Blitar yang tidak masuk dalam daftar penerima manfaat program Raskin Pusat. Artinya, kebijakan pro poor yang diwujudkan Pemerintah Kota Blitar melalui program fasilitasi pemberian Raskin Daerah tersebut adalah dalam rangka memberikan kontribusi nyata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar guna menutupi kesenjangan antara data rumah tangga sasaran yang bersumber dari hasil PPLS 2011-BPS dengan rumah tangga miskin dan fakir miskin yang riil di lapangan. Dengan terlaksananya fasilitasi pemberian Raskin Daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi keberlangsungan hidup rumah tangga sasaran penerima manfaat, sehingga semangat menuju Rukun Agawe Santoso senantiasa dapat terwujud di seluruh elemen masyarakat. (*Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskinda Tahun 2017*)

Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan program, dan Kecamatan/Kelurahan selaku pelaksananya harus selalu bersinergi melalui peningkatan kinerja, sinkronisasi dan koordinasi antar instansi/lembaga terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dengan mengedepankan peran aktif partisipasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan efektifitas program agar penyaluran Raskin Daerah kepada penerima manfaat dapat mencapai target 5 (lima) Tepat, yakni Tepat Sasaran



Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. (*Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskinda Tahun 2017*)

#### **b. Dasar Hukum Raskinda**

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskinda adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

- 10) Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar;
- 11) Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
- 12) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2015 – Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan dan Koordinasi Raskin;
- 13) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD masing-masing Kecamatan se Kota Blitar Tahun Anggaran 2015 – Kegiatan Fasilitas Pemberian Raskin Daerah. *(Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskinda Tahun 2017)*

**c. Tujuan dan Sasaran**

- 1) Tujuan program raskinda adalah mengurangi beban pemenuhan kebutuhan rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- 2) Sasaran program raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) melalui pemberian beras secara gratis dengan alokasi sebanyak 10kg/RTS/bulan selama 12 bulan, dengan sasaran RTS-PM yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar. *(Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskinda Tahun 2017)*

#### d. Perencanaan dan Penganggaran

Pagu/data sementara rumah tangga sasaran penerima Raskinda Kota Blitar tahun 2017 adalah sesuai dengan hasil Muskel atau pendataan melalui masing-masing kecamatan se kota blitar pada tahun 2016, yang secara keseluruhan sebanyak 11.854 sasaran penerima manfaat, dengan perincian:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| a) Kecamatan Sukorejo      | : 4.519 sasaran |
| b) Kecamatan Sananwetan    | : 3.903 sasaran |
| c) Kecamatan Kepanjenkidul | : 3.432 sasaran |
|                            | <hr/>           |
|                            | 11.854 sasaran  |

Biaya operasional untuk aloksi program Raskinda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar. (*Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskinda Tahun 2017*)

Penetapan penerima manfaat program Raskin Daerah dilaksanakan melalui Musyawarah Kelurahan secara transparan dan partisipatif yang dipimpin oleh Lurah dihadiri aparat Kelurahan (termasuk RT, RW), LPMK, tokoh masyarakat, perwakilan rumah tangga miskin, fakir miskin, dan janda penerima manfaat. Hasil Musyawarah Kelurahan tersebut kemudian dilampiri Berita Acara Penetapan dan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin Daerah yang ditanda tangani Lurah dan disahkan oleh Camat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian ilmiah agar lebih terarah dan dapat diterima oleh orang lain diperlukan suatu metode penelitian yang merupakan cara-cara ilmiah yang bermaksud untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Hasil penelitian ini nantinya digunakan untuk mengetahui tentang evaluasi program Raskinda (Beras Miskin Daerah) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada kecamatan Sukorejo Kota Blitar).

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menurut (Sugiyono, 2003: 5) dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, serta analisis dan jenis data. Dengan mengetahui jenis-jenis penelitian tersebut, maka peneliti diharapkan dapat memilih metode yang paling efektif dan efisien untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk pengembangan ilmu, teknologi serta memecahkan masalah-masalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013: 11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain. Sedangkan menurut (Wiratha, 2005: 154), penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran suatu konsep, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subjek penelitian pada saat ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. (Mamm & Sambas, 2011: 9) Pendekatan kualitatif adalah suatu model penelitian humanistic, yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa social atau budaya. Sedangkan penelitian kualitatif menurut (Strauss, 2013: 5) penelliti nonmatematis, temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Saran itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video, dan bahkan data yang dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus.

Uraian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan dan dapat digunakan sebagai dasar bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipandang lebih mendukung dan memberi arti dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan focus penelitian. Hal ini dikarenakan semua data yang berkaitan dengan Evaluasi Program Raskinda (Beras Miskin Daerah) dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diperlukan untuk pembatasan penelitian agar peneliti dapat terhindar dari data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, sekaligus untuk memfokuskan pembahasan, sehingga



penelitian ini dapat berjalan secara efisien. Pembatasan dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga factor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu (Sugiyono, 2014: 207). Fokus penelitian ini pada dasarnya digunakan untuk membantu keputusan yang tepat tentang data mana yang diperlukan dan dikumpulkan dan mana yang tidak digunakan. Dalam rangka mempermudah pencarian informasi mengenai data dan informasi yang diperlukan.

Jadi fokus dalam penelitian ini memiliki titik terpenting tentang “Evaluasi Program Raskinda (Beras Miskin Daerah) dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Kelurahan Sokorejo Kota Blitar”. Maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Raskinda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar dapat diukur melalui empat dimensi (Beni Setiawan, 1999:20):
  - a) Indikator masukan (input)
  - b) Proses (Process)
  - c) Keluaran (Output)
  - d) Indikator dampak (Outcome)
2. Program Beras Miskin daerah (Raskinda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar dengan indikator kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a) Meningkatkan pendapatan
  - b) Terpenuhiya pangan
  - c) Kesehatan

d) Pendidikan

**C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kota Blitar. Adapun alasan mengapa penulis memilih lokasi di tempat tersebut karena Kota Blitar merupakan kota yang mempunyai program Raskinda.

Situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kota Blitar Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kota Blitar Bagian Kesejahteraan Masyarakat adalah yang meluncurkan program Raskinda yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dinas Sosial Kota Blitar

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan pelaksana dari program Raskinda yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

3. Kecamatan Sukorejo

Kecamatan Sukorejo merupakan yang menyalurkan atau tempat mendistribusikan Raskinda kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Kecamatan Sukorejo merupakan kecamatan yang paling banyak mendapatkan Raskinda.

Adapun alasan dari peneliti memilih situs penelitian yang disebutkan diatas adalah dikarenakan Kecamatan Sukorejo merupakan yang memiliki jumlah penerima Raskinda terbanyak yang berarti bahwa banyak permasalahan mengenai kemiskinan yang harus diperhatikan.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dan jenis data menurut Moleong (2014: 157) menjelaskan, “Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman Video/audiotapes, pengambilan foto, atau film”. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Menurut Idrus (2007: 113) data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi data atau data tersebut. Sedangkan menurut Loftlan dalam Moleong (2012: 112) sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber di bawah ini:

- a. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesra Kota Blitar
- b. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Blitar
- c. Kasi Perekonomian dan Kesra Kecamatan Sukorejo

- d. Ketua RT/RW di masing-masing kelurahan Kecamatan Sukorejo
- e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing kelurahan di Kecamatan Sukorejo
- f. Keluarga yang tidak menerima Raskinda.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut (Idrus, 2007: 113). Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Artikel dan informasi dari jurnal dan internet
- b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Daerah Kota Blitar Tahun 2017
- c. Laporan Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Koordinasi Raskin/Rastra Daerah Kota Blitar Tahun 2017
- d. Dokumen Kecamatan Sukorejo dalam Angka 2017

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam sebuah penelitian ilmiah, data yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab sekaligus memecahkan masalah yang ada. Dengan alasan tersebut

maka data yang dikumpulkan harus valid dan akurat. Menurut Sugiyono (2008:156) terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan reabilitas, instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan informasi dengan wawancara dilakukan melalui narasumber yang disebut informan. Wawancara ditujukan kepada informan yang dianggap memiliki kapasitas sesuai dengan focus penelitian. Jenis teknik wawancara atau interview merupakan data primer sebagai pelengkap data-data lain yang dihimpun dengan teknik yang berbeda. Hasan dalam Emir (2012) mendefinisikan wawancara sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Sulistyo,Basuki, 2006: 173). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan dapat menggali informasi secara mendalam tentang Program Beras Miskin Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Blitar. Kemudian berdasarkan hubungan yang berkaitan, berikut informan yang diwawancari oleh peneliti:



- a. Bapak Anang Setiawan, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesra Kota Blitar
- b. Bapak Jito Baskoro, S.Sos selaku Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Blitar
- c. Ibu Lilik Hariyani, SE selaku Kasi Perekonomian dan Kesra Kecamatan Sukorejo
- d. Yayuk Setiani selaku penerima beras Raskinda di Kelurahan Blitar
- e. Tumidjah selaku penerima beras Raskinda di Kelurahan Blitar
- f. Widji Astutik selaku penerima beras Raskinda di Kelurahan Sukorejo
- g. Suyadi selaku penerima beras Raskinda di Kelurahan Sukorejo
- h. Rubiatun selaku warga yang tidak mendapatkan Raskinda di Kelurahan Pakunden

## 2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dalam metode penelitian kualitatif dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Secara mendasar, teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan empiris, atau dengan kata lain menggunakan panca indera, baik indera penglihatan, indera pendengaran, dan lainnya guna memperoleh informasi atau data untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu” (Emir, 2012). Pengamatan dilakukan untuk melihat interaksi nyata antara objek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Peneliti akan mengamati secara langsung maupun tidak

langsung untuk melihat mengenai Evaluasi Program Raskinda di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Dapat dilihat dari observasi yang dilakukan dilapangan perbedaan kualitas beras dari pemerintah pusat dengan yang diberi oleh Pemerintah Kota Blitar. Serta secara tidak langsung melihat bagaimana pelaksanaan program Raskinda yang ada di Kecamatan Sukorejo melalui hasil dokumentasi, yang terdapat pada halaman lampiran.

### 3. Dokumen

Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai suatu hal atau variable salah satunya melalui dokumentasi. Dokumen menurut Sugiyono (2009: 240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini dokumentasi berfungsi sebagai bukti yang otentik bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Dokumen yang digunakan peneliti berupa foto kegiatan pelaksanaan program beras miskin daerah. Dan dokumen yang digunakan lainnya adalah dokumen yang berhubungan dengan masalah program beras miskin daerah. Hasil obeservasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi. Dokumen yang diterima oleh peneliti adalah:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Daerah Kota Blitar Tahun 2017
2. Laporan Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Koordinasi Raskin/Rastra Daerah Kota Blitar Tahun 2017
3. Data BNBA Raskinda Kec. Sukorejo tahun 2015-2016
4. Rekap Data Raskinda Tahun 2015-2017

## F. Instrumen Penelitian

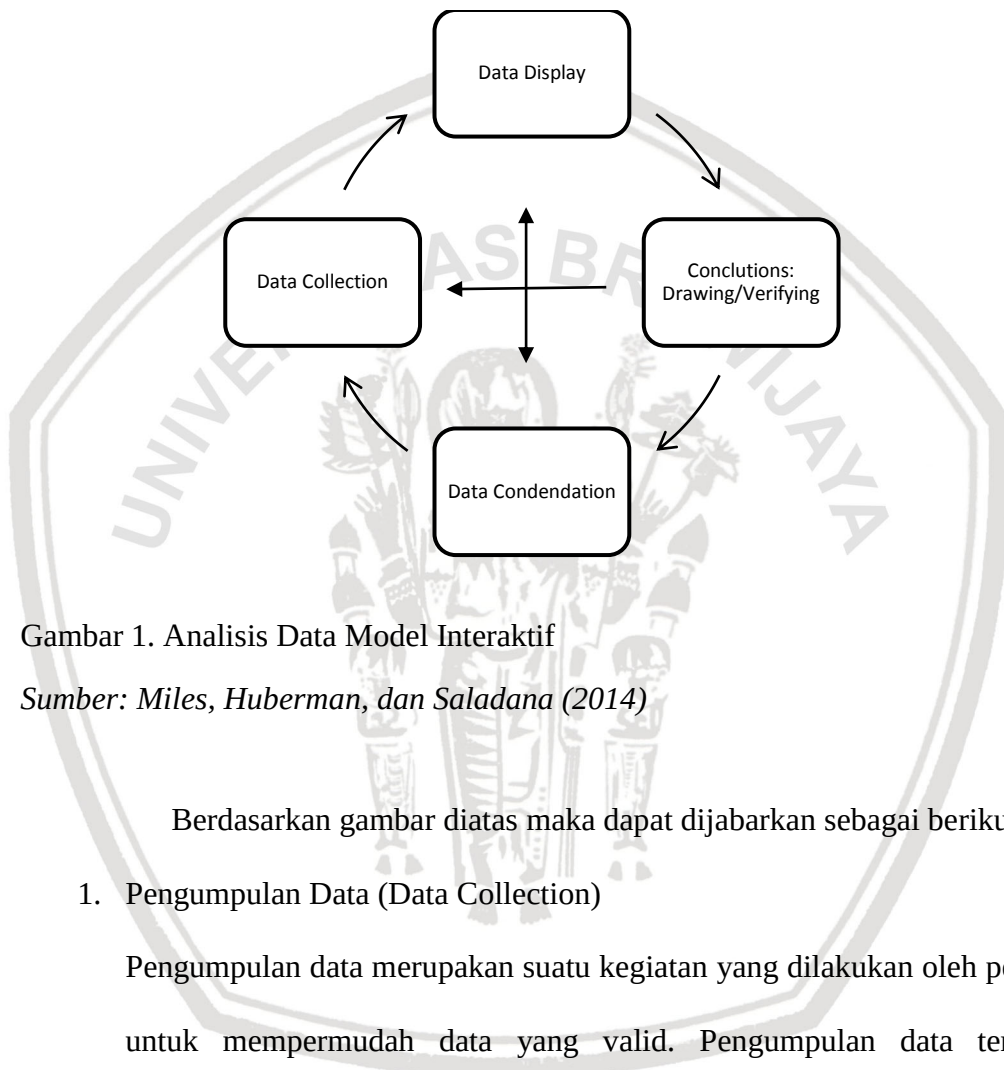
Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan (Sukardi, 2003: 75). Dalam penelitian yang berkaitan dengan evaluasi program raskinda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Blitar ini, peneliti menggunakan instrument berupa:

1. Peneliti sendiri yang merupakan alat utama dalam mengumpulkan data, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.
2. Pedoman wawancara atau interview guide yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan untuk informan. Pedoman wawancara berguna untuk mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data dalam melakukan wawancara.
3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan dan alat tulis menulis yang digunakan dalam mencatat apa saja yang didengar dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Selain itu juga dapat ditambah lagi alat perekam yang dapat mempermudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

## G. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah data yang telah dibutuhkan terkumpul, yang harus dilakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Berdasarkan hal tersebut maka analisa dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014). Miles, Huberman, dan Saldana mengemukakan bahwa model analisis

interaktif terdiri dari 4 komponen yakni pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan atau verifikasi (verification). Model analisis data interaktif adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saladana (2014)

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mempermudah data yang valid. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian observasi di lapangan dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data

berlangsung terus menerus selama peneliti bahkan sebenarnya kondensasi dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi dapat dilakukan dengan cara data yang diperoleh di lokasi peneliti dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung dan pada tahap analisis data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.

### 3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah terkumpul dan diklarifikasikan selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun kalimat atau uraian. Dalam hal ini peneliti menyajikan data dengan deskripsi pembahasan yang telah disesuaikan pada hasil matriks peneliti.

### 4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing/Verifying)

Penarikan kesimpulan yakni untuk menganalisis serta mencari makna (meaning) dari data yang ada hingga dapat ditemukan tema, pola hubungan ataupun proposisi-proposisi. Selanjutnya dengan bertambahnya data melalui proses secara terus menerus, akan diperoleh kesimpulan dan dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Pada penarikan



kesimpulan peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil matriks yang telah peneliti rinci dari focus, hasil wawancara, emuan, teori, dan pembahasan.

#### H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2014: 177). Uji keabsahan di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik triangulasi menurut Moleong (2011: 330-331) dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Triangulasi Sumber  
Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik  
Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik dengan berbeda.
3. Triangulasi Waktu  
Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Sukorejo

###### a. Kondisi Geografis dan Topografi

Kecamatan Sukorejo merupakan salah satu diantara tiga kecamatan yang ada di Kota Blitar. Kecamatan Sukorejo memiliki luas wilayah 9,92 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 7 kelurahan. Kelurahan terluas adalah kelurahan Tanjungsari dengan luas wilayah 2,460 km<sup>2</sup>, sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Turi sekitar 7,55% dari luas kecamatan Sukorejo dengan luas wilayah 0,51 km<sup>2</sup>. Jarak kelurahan terjauh dari kantor Kecamatan Sukorejo yaitu Kelurahan Tanjungsari kirang lebih 4 km, sedangkan kelurahan terdekat yaitu Kelurahan Turi sekitar 0.3 km. Ketinggian dari permukaan air laut 191 m, dengan suhu rata-rata 23°C – 32°C. Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Sukorejo meliputi:

Sebelah Utara : Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dan  
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Sebelah Timur : Kecamatan Kepanjenkidul dan kecamatan  
Sananwetan Kota Blitar

Sebelah Selatan : Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan  
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

(Kecamatan Sukorejo dalam Angka 2017)



Gambar 2. Peta Kecamatan Sukorejo

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian

(<https://singoutnow.wordpress.com/2016/12/27/kecamatan-sukorejo-kota-blitar/> )

Tabel 4. Daftar Kelurahan di Kecamatan Sukorejo

| No | Kelurahan    | Kode Pos |
|----|--------------|----------|
| 1. | Sukorejo     | 66121    |
| 2. | Pakunden     | 66122    |
| 3. | Tlumpu       | 66124    |
| 4. | Karang Sari  | 66125    |
| 5. | Blitar       | 66126    |
| 6. | Tanjung Sari | 66126    |
| 7. | Turi         | 66126    |

Sumber: Data sekunder hasil penelitian 2018

(<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-blitar-jawa-timur-jatim.html> )

#### b. Kondisi Kependudukan

Secara administrative wilayah Kecamatan Sukorejo terdiri atas 7 kelurahan, 50 Rukun Warga (RW) dan 185 RukunTetangga (RT) dengan jumlah penduduk 51,814 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun lalu jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 4,07% atau bertambah 2,031 jiwa. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kelurahan Sukorejo, dengan jumlah penduduk 14,643 jiwa,

sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kelurahan Turi, dengan jumlah penduduk 3.123 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Sukorejo pada tahun 2016 mencapai 5,223 jiwa/km<sup>2</sup> atau sekitar 5 orang/m<sup>2</sup>. Kelurahan dengan penduduk terpadat di Kecamatan Sukorejo adalah Kelurahan Sukorejo dengan kepadatan penduduk mencapai 9,987 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kelurahan dengan penduduk terjarang adalah Kelurahan Blitar dengan tingkat kepadatan penduduk 3,494 jiwa/km<sup>2</sup>. (Kecamatan Sukorejo Dalam Angka 2017)

### c. Tugas dan Fungsi

Tugas: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Fungsi: 1) perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan.

2) pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya

3) penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan

4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5) penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan



- 6) pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pemabangunan
- 7) pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan penanggulangan masalah sosial
- 8) pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya
- 9) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kecamatan
- 10) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
- 11) pelaksanaa pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
- 12) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
- 13) penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP)
- 14) pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- 15) pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan

16) pengelolaan pengaduan masyarakat

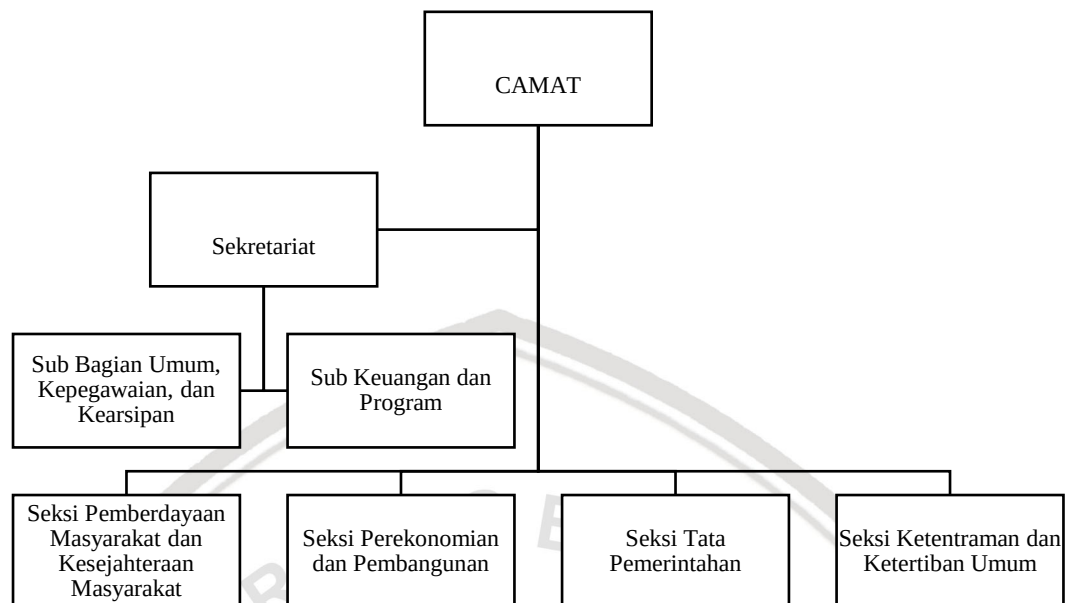
17) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kecamatan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah

18) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecataman

19) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **d. Struktur Kepegawaian**

Kedudukan kecamatan adalah sebagai perangkat daerah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, yang dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun struktur kepegawaian Kecamatan Sukorejo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo 2017

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Kecamatan Sukorejo 2017)

## B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

### 1) Proses Evaluasi Program Raskinda di Kota Blitar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar

#### a. Indikator Masukan (*input*)

Latar belakang atau alasan, kriteria penerima manfaat, serta tujuan dan sasaran adanya program Raskinda yang ada di kota Blitar termasuk dalam indikator masukan (*input*). Latar belakang adanya program Raskinda ini adalah sebagai upaya untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam hal pemenuhan pangan. Maka dari itu pemerintah pusat memberikan fasilitas pemenuhan hak dan

kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui penyaluran program Raskin/Rastra di beberapa daerah dan dengan mekanisme bantuan sosial (pangan) secara non tunai yang dilaksanakan di beberapa kota dan kabupaten termasuk Kota Blitar. Dengan demikian pemerintah pusat melaksanakan dua model penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat miskin, yaitu melalui program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin/Rastra) dan program bantuan sosial (pangan) secara non tunai dengan menggunakan system perbankan yang diberikan dalam bentuk kupon elektronik (e-voucher).

Program Raskin/Rastra dan bantuan pangan secara non tunai yang dilaksanakan pemerintah pusat tersebut merupakan salah satu perwujudan kebijakan penanggulangan kemiskinan (pro poor) yang dinilai sangat relevan dan sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Blitar dalam menuntaskan penanggulangan permasalahan kemiskinan di Kota Blitar, dengan arah kebijakan yang salah satunya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Berangkat dari sinergitas program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah kota blitar, maka pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Raskin Daerah yang diberikan kepada penerima manfaat secara gratis. Program raskin daerah dilaksanakan karena daya beli masyarakat (miskin) di Kota Blitar yang memang masih rendah. Hal ini patut disadari mengingat harga-harga kebutuhan pokok yang semakin lama semakin tinggi, yang tentunya bagi masyarakat menengah

kebawah, hal tersebut sangat berpengaruh dan menjadikannya sebagai beban utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Selain itu, guna menutupi kesenjangan antara data rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM) 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dengan keluarga miskin dan fakir miskin yang riil di lapangan. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Blitar Bapak Jito (wawancara tanggal 6 Juni 2018, pukul 12.30 WIB di Dinas Sosial Kota Blitar) berikut ini:

“Program Raskinda yang ada di Kota Blitar itu merupakan bantuan pendamping dari bantuan yang diberikan oleh pusat. Jadi masyarakat yang tidak tercover bantuan dari pusat itu oleh pemerintah Kota Blitar diberi bantuan berupa beras secara gratis. Kan pemerintah pusat itu tidak melihat langsung penerima manfaat jadi masih banyak yang belum tercover oleh bantuan dari pusat.”

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Ibu Lilik selaku Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar (wawancara tanggal 8 Juni 2018, pukul 14,00 WIB di Kantor Kecamatan Sukorejo) sebagai berikut:

“jadi gini raskinda itu kalo pusat itu punya program rastra dulu berupa beras yang dibagikan datanya dari data pusat tahun 2011 terus yang gak masuk atau tercover rastra itu tadi oleh pemerintah kota blitar diberi raskinda itu 10kg/bulan secara gratis sedangkan rastra itu bayar 1500/kg. tapi mulai tahun ini itu rastrada sudah tidak ada terus diganti e warung BPNT lewat ewarung bekerjasama dengan ewarung yang bisa diambil dengan barang, ewarung itu kota blitar sudah player project yg non tunai kalau didaerah lain berupa rastra berupa beras”



Pelaksanaan Program Raskin Daerah di Kota Blitar diperuntukan bagi keluarga miskin dan fakir miskin yang tidak tercover melalui Program Bantuan Pangan Secara Non Tunai dari pemerintah pusat. Selain itu juga bagi KPM Rastra yang tidak terdata pada program BNPT tetapi tidak memiliki Kartu KKS/PBI-JKN/KIP, apabila dinilai layak melalui proses muskel dapat diusulkan sebagai penerima Raskin Daerah. Kedua hal tersebut masuk kedalam kriteria keluarga penerima manfaat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Jito (wawancara pada tanggal 6 Juni 2018, pukul 12.30 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Blitar) sebagai berikut:

“Warga miskin yg ada di kota blitar yg tidak tercover dalam program BPNT. Ada dua PKH dan nonPKH. Pkh ada komponennya pendidikan kesehatan dan lansia.”

Kenyataan yang ada, dalam pengusulan penerima Program Raskin Daerah ada sebagian penerima Program Raskin Daerah yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Ada keluarga penerima yang sebenarnya mampu oleh ketua RT diusulkan agar mendapat bantuan tersebut dalam muskel. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Lilik (wawancara tanggal 8 Juni 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor kecamatan Sukorejo)

“Dalam pengusulan penerima manfaat itu ya mbak kadang masih ada yang memiskinkan diri. Jadi yang seharusnya gak dapet malah dapet mbak. Pak rt nya ya gitu, kalo ada yang gak mampu tapi kalo pas ada acara dilingkungan jarang berpartisipasi gitu gak dimasukan mbak. Pak rt masih kurang tegas dalam mengusulkan penerima manfaat. Jadi, ya kadang masih kurang tepat sasaran mbk. Tapi semua berjalan dengan baik Cuma beberapa aja yang kurang.”

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Ibu Rubiatun warga RT 3 RW 7 Kelurahan Pakunden (Wawancara tanggal 9 Juni 2018, Pukul 15.00 WIB) sebagai berikut:

“saya lo mbak belum dapet bantuan beras gratis dari kota, padahal samean liat to keadaan ku koyok ngene, pak RT ne paling gurung mengusulkan iki mbak, aku yo wes sambat gene pak RT kon ngusulne tapi sampek saiki gurung oleh mbak, paling tahun depan oleh mbah yo”

Kemudian yang menjadi masukan dalam suatu program adalah tujuan dan sasaran dari program tersebut. Tujuan dan sasaran dari program Raskin Daerah Kota Blitar adalah mengurangi beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dan sasaran dari program tersebut adalah berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat melalui pemberian beras daerah secara gratis dengan alokasi sebanyak 10kg/KPM/bulan selama 12 bulan, dengan sasaran KPM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar.

Pengamatan peneliti lapangan mengenai tujuan dari adanya program raskin daerah tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Blitar. Masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Blitar merasa terbantu dengan adanya Raskin daerah sehingga kebutuhan pangan pokok terpenuhi dengan baik tidak sampai kekurangan. Dengan jumlah beras 10kg/bulannya masyarakat sangat terpenuhi salah satu kebutuhan pokoknya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu penerima raskin daerah ibu Yayuk Setiani

(wawancara tanggal 10 Juni 2018 pukul 15.00 WIB di Jalan Pamungkur No 54 RT 1 RW 3) sebagai berikut:

“Alhamdulillah ya mbak saya ini kan gak dapet bantuan dari pemerintah pusat, saya ini dari keluarga yang kurang mampu mbak tapi gak dapet bantuan dari pemerintah pusat, dan untungnya kok ya dapet bantuan dari kota. Bantuan yang saya terima dari kota ini sangat bermanfaat sekali mbak, dapet beras gratis 10kg tiap bulannya. Sangat membantu sekali”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tumidjah mengenai tujuan yang dirasakan dari program raskin daerah Kota Blitar (wawancara tanggal 12 Juni 2018 pukul 15.00 WIB di Jalan Aryo Blitar gang 1 No 20) sebagai berikut:

“saya sangat merasa terbantu ya mbak sama program raskinda, lha setiap bulannya dikasih beras gratis sama pemerintah. Jadi beban untuk membeli beras jadi ringan, bahkan gak beli mbak, soalnya sangat cukup.”

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan diatas mulai dari mengenai latar belakang atau alasan adanya program, kriteria penerima program hingga tujuan dan sasaran program tersebut masih terdapat permasalahan dibagian penentuan kriteria penerima program. Yang dimana masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan program tersebut tetapi oleh ketua RT tetap dimasukan kedalam daftar penerima program.

#### **b. Proses (*process*)**

Proses dalam Program Raskinda disini terdapat dua hal yaitu penetapan penerima manfaat dan tahapan pelaksanaan Raskinda secara

umum. Didalam proses penetapan penerima manfaat Tim Pelaksana dan Koordinasi Raskin Daerah di masing-masing Kecamatan/Kelurahan perlu mengadakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan local terhadap calon penerima manfaat program Raskin Daerah. Muskel tersebut dilaksanakan secara transparan dan partisipatif yang dipimpin oleh lurah yang dihadiri aparat Kelurahan (termasuk RT dan RW) TKSK, LPMK, tokoh masyarakat, perwakilan keluarga miskin dan fakir miskin calon penerima manfaat. Sebagai kelengkapan hasil Muskel, harus dilampiri dengan Berita Acara Penetapan dan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin Daerah yang ditanda tangani oleh lurah dan disahkan oleh camat, untuk kemudian digunakan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Kepala Kecamatan (camat). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Lilik (wawancara tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Kecamatan Sukorejo) sebagai berikut:

“untuk proses program raskinda ini pertama ya menentukan KPM lewat muskel, muskel itu dihadiri sama aparat kelurahan, tokoh masyarakat, sama perwakilan dari calon keluarga penerima manfaat. Kemudian dari hasil muskel itu sebagaia dasar surat keputusan camat.”

Musyawarah Kelurahan (Muskel) dalam pelaksanaannya terdapat mekanisme dan ketentuan yang harus dilaksanakan dalam menentukan penerima manfaat. Adapun mekanisme dan ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meskel yang dilaksanakan di awal tahun (sebelum proses lelang beras);

- a. Apabila terdapat perubahan nama calon KPM yang sudah tidak layak (KPM yang meninggal dunia tanpa ahli waris, dan yang pindah alamat tinggalnya, atau karena suatu hal lain), maka KPM tersebut tidak boleh digantikan oleh keluarga miskin atau fakir miskin lain kecuali oleh ahli warisnya (pasangan kepala keluarga atau anggota keluarga) apabila ada.
  - b. Dari data sementara calon KPM raskin daerah tersebut yang nama dan alamatnya masuk dan menjadi penerima program BNPT pemerintah pusat, maka KPM tersebut termasuk keluarganya tidak diperbolehkan untuk dimasukkan/diusulkan lagi sebagai penerima raskin daerah.
  - c. Terdapat beberapa nama dan alamat KPM program raskin/rastra dari tahun sebelumnya yang telah dikeluarkan dan tidak lagi menjadi penerima program BNPT pemerintah pusat tahun berikutnya, apabila KPM yang dikeluarkan tersebut merupakan peserta KKS/PBI-JKN/KIP, maka dapat
- 2) Apabila proses lelang Raskin Daerah telah selesai dilaksanakan dan mulai disalurkan kepada KPM, dan setelahnya pada tahun berjalan terdapat perubahan KPM (meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang pindah alamat tinggalnya), maka KPM Raskin Daerah tersebut dapat diganti dengan keluarga miskin lainnya atau fakir miskin yang belum terdaftar tetapi dinilai layak sebagai penerima manfaat melalui proses Muskel, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara muskel dan atau surat keterangan/surat pernyataan sebagai dasar



perubahannya, yang ditandatangani lurah dan disahkan oleh camat, untuk kemudian dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam surat keputusan tentang perubahan nama dan alamat KPM.

3) Sedangkan untuk perubahan KPM yang pindah alamat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas mengandung pengertian sebagai berikut;

- a. Untuk KPM yang pindah alamat tinggalnya keluar kelurahan ke kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatan di Kota Blitar, maka masing-masing kelurahan menerbitkan surat keterangan sementara terkait perubahan alamat PKM dimaksud sebagai dasar untuk pengambilan Raskin Daerah. Selanjutnya surat keterangan tersebut dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam surat keputusan camat tentang perubahan nama dan alamat KPM, dan kemudian dilaporkan kepada tim Pelaksana dan koordinasi Raskin Daerah Kota Blitar dengan tembusan Dinas Sosial Kota Blitar.
- b. Untuk KPM yang pindah alamat tinggalnya keluar kecamatan ke kecamatan lain dalam wilayah Kota Blitar, maka masing-masing kecamatan menerbitkan surat keterangan sementara terkait perubahan alamat PKM dimaksud sebagai dasar untuk pengambilan Raskin Daerah. Selanjutnya surat keterangan tersebut dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam surat keputusan camat tentang perubahan nama dan alamat KPM, dan kemudian dilaporkan kepada tim pelaksana dan koordinasi

Raskin Daerah Kota Blitar dengan tembusan Dinas Sosial Kota Blitar.

- c. Untuk KPM yang pindah alamat tinggalnya keluar wilayah Kota Blitar, maka dapat digantikan oleh KPM lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, dan kemudian diberikan kartu Raskin Daerah atau bukti pengambilan dalam bentuk yang lain sebagaimana identitas penerima Raskin Daerah Kota Blitar.
- 4) Keluarga miskin atau fakirs miskin yang dinilai layak untuk menggantikan penerima manfaat diprioritaskan kepada fakir miskin atau keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga lebih besar yang terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
- 5) Hasil verifikasi/perubahan melalui muskel yang dituangkan dalam berita acara dan/atau surat keterangan/surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, untuk kemudian diberikan kartu Raskin Daerah atau bukti pengambilan dalam bentuk yang lain sebagai identitas penerima Raskin Daerah Kota Blitar, dan selanjutnya dilaporkan oleh camat kepada tim pelaksana dan koordinator Raskin Daerah Kota Blitar dengan tembusan Dinas Sosial Kota Blitar.
- 6) Pelaksanaan Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan, hal ini guna mengakomodasi adanya

dinamika penerima manfaat di kelurahan yang setiap saat bisa berubah.

Adapun untuk alur/tahapan penetapan surat keputusan tentang daftar nama dan alamat KPM Raskin daerah sebagai berikut:

KEPALA KECAMATAN (CAMAT)  
Menetapkan Daftar Nama dan Alamat  
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Raskin Daerah Kecamatan .....  
Kota Blitar Tahun anggaran ....., melalui surat keputusan Camat



WALI KOTA BLITAR  
Menetapkan Daftar dan Alamat  
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Raskin Daerah  
Kota Blitar Tahun Anggaran .... , melalui surat keputusan walikota Blitar

Anggaran tersebut diatas selanjunya dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan lelang pengadaan beras melalui Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam proses penetapan nama dan alamat KPM terkadang masih tidak sesuai dengan proses penetapan nama dan alamat KPM yang telah dibuat. Terdapat kesalahan yang dilakukan ketua RT yang mendata KPM. Terdapat KPM yang pindah tempat diluar kelurahan tetapi oleh ketua RT tersebut secara langsung dicarikan ganti

oleh warga yang lain yang ada satu wilayah dengan ketua RT tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang harus dilaksanakan dalam menentukan penerima manfaat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Lilik (wawancara tanggal 8 Juni 2018 pukul 14.00 WIB di kantor kecamatan sukorejo)

“Jadi sebenarnya sudah diseleksi oleh pak rt, kadang pak rt itu gini kalo ada yg meninggal itu langsung dicarikan gantinya. Sebenarnya kita sudah bilang kalo ada yang meninggal jangan langsung cari diganti, bisa diganti dari rt lain misal pindahan dan orangnya tidak mampu bisa dimasukan sebagai gantinya. Tp sebenarnya kita sudah menekan. Agar tidak seperti itu lagi.”

Selain tahapan penetapan surat keputusan tentang daftar nama dan alamat KPM, juga terdapat tahapan pelaksanaan Program Raskin/Rastra secara umum. Adapun tahapan pelaksanaan Program Raskin/Rastra secara umum sebagai berikut:

1. Hasil pendataan dari Bappeda diusulkan oleh kecamatan kepada tikor Raskinda Kota untuk dilaporkan kepada walikota Blitar guna mendapatkan rekomendasi/persetujuan
2. Rekomendasi/persetujuan dari walikota kemudian ditinjau lanjuti denga Rakor bersama tim kota termasuk Dinas Sosial dan kecamatan sekaligus membahas persiapan pelaksanaanya.



1. Penetapan SK Walikota, meliputi:
  - a) Tim fasilitasi pelaksanaan dan koorninator Raskin/Rastra tingkat kota
  - b) Tim pelaksana dan koordinasi program Raskin/Rastra Daerah pada Dinas Sosial Kota Blitar
  - c) Tim pelaksana koordinasi dan distribusi Raskin/Rastra Daerah di tingkat kecamatan/kelurhan
2. Penerbitan Perwali tentang Juknis Pelaksanaan Program Raskin/Rastra Daerah



1. Sosialisai & muscam/muskel
2. Pagu/data nama & alamat KPM hasil Muskel ditetapkan melalui SK Walikota.
3. Pengadaan Raskinda oleh Dinas Sosial melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan



1. Launching penyaluran Raskin/Rastra Daerah (Bila diperlukan)
2. Penyaluran Raskin/Rastra Daerah di Kelurahan
3. Monev pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra Daerah
4. Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban

Pelaksanaan program Raskin/Rastra Daerah pada tahun 2017, bahwa untuk pengelolaan kegiatan secara teknis yang sebelumnya berada di kecamatan, saat ini pengelolaanya telah beralih ke Dinas Sosial Kota Blitar, sedangkan regulasi dan kebijakan program tetap dilaksanakan melalui tim sekretariat daerah melalui Bagian Perekonomian dan Kesra. Pengelolaan program Raskin/Rastra Daerah tahun 2017 di Dinas Sosial Kota Blitar tersebut bertepatan dengan pengelolaan program BPNT pemerintah pusat (yang sebelumnya adalah program Raskin/Rastra Pusat) yang saat ini juga dikelola melalui Dinas



Sosial sesuai kebijakan Kementerian Sosial RI. Mengingat pada bulan Januari-Maret 2017 informasi kejelasan terhadap pelaksanaan program BNPT pusat belum ada kepastian, maka untuk pelaksanaan program Raskin/Rastra Daerah tentu juga mengalami keterlambatan karena keterkaitan dengan kepastian penggunaan datanya. Mengenai hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Jito (wawancara tanggal 6 Juni 2018 pukul 12.30 di kantor dinas sosial kota blitar) sebagai berikut:

“awalnya program ini dari kesra mbak, terus tahun 2017 diganti ke Dinas Sosial. Tahun 2017 juga pas dengan pengelolaan program BPNT dari pemerintah pusat, jadi untuk pelaksanaan program raskinda mengalami keterlambatan.”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak Jito tersebut juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Anang (wawancara tanggal 4 Juni 2018 pukul 10.00 WIB di ruang kesra Kota Blitar)

“program raskinda ini awalnya dari sini mbk (kesra Kota Blitar) terus mulai tahun 2017 dipindah programnya yang ngurusi Dinsos. Kesra cuma mengatur kebijakannya saja, untuk pelaksanaannya di Dinsos. Tahun 2017 juga ada keterlambatan penyaluran soalnya ya itu barengan sama program BPNT dari pusat. Jadi diselesaikan dulu datanya BPNT baru dapet datanya unruk raskinda, kan gak boleh dapet double, harus salah satu.”

Indikator kepastian pelaksanaan BPNT adalah disampaikan data PBDT tahun 2015 untuk program BPNT yang diterima pemerintah Kota Blitar pada bulan April 2017, yang kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi data dengan penyandingan data calon penerima Raskin/Rastra Daerah dan data PBDT 2015 dimaksud yang dilaksanakan melalui muskel. Sehingga dihasilkan jumlah PKM program Raskin/Rastra Daerah Kota Blitar. Mengingat terbatasnya waktu, maka data penerima Raskin/Rastra Daerah hasil muskel tersebut

untuk kemudian ditetapkan melalui keputusan Walikota Blitar dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan pelelangan beras.

**c. Keluaran (*output*)**

Program Raskin /Rastra Daerah dilaksanakan dalam rangka memberikan kontribusi nyata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota blitar guna menutupi kesenjangan antara data keluarga penerima manfaat BPNT yang bersumber dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BPDT) 2015 dengan rumah tangga miskin dan fakir yang riil di lapangan, dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari pengalaman Pancasila dalam rangka membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi keberlangsungan hidup keluarga penerima manfaat, sehingga semangat menuju Rukun Agawe Santoso senantiasa dapat terwujud di seluruh elemen masyarakat. Adapaun tujuan dari Program Raskin/Rastra Daerah adalah mengurangi beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang berikan oleh Ibu Lilik, (wawancara tanggal 8 Juni 2018 pukul 14.00 WIB di kantor kecamatan sukorejo) sebagai berikut:

“kalo manfaat yo jelas manfaat, masyarakat dikasih beras secara gratis sebanyak 10kg setiap bulannya. Jadi kebutuuh beras jadi terpenuhi. Jadi ya sesuai dengan tujuan pemerintah yang bertujuan

untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pangan.”

Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa tujuan dari Program Raskinda Kota Blitar yaitu mengurangi beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras sudah tercapai.

Selanjutnya sasaran dari Program Raskinda Kota Blitar adalah berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemberian beras daerah secara gratis dengan alokasi sebanyak 10kg/ KPM/ bulan selama 12 bulan, dengan sasaran KPM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar juga sudah tercapai. Setiap empat bulan sekali masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam program Raskinda mendapat beras secara gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Hasil penelitian dilapangan selanjutnya adalah terlihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 5. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Sukorejo**

**Tahun 2015-2017**

| No | Kecamatan     | Tahun |       |       |
|----|---------------|-------|-------|-------|
|    |               | 2015  | 2016  | 2017  |
| 1  | Kepanjenkidul | 3.747 | 3.432 | 3.256 |

|   |            |       |       |       |
|---|------------|-------|-------|-------|
| 2 | Sukorejo   | 4.869 | 4.537 | 4.459 |
| 3 | Sananwetan | 4.370 | 3.920 | 3.938 |

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018  
(Dokumen Rekap Data Raskinda Tahun 2015-2017, 2018)

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah KPM dari tahun ke tahun mengalami penurunan terutama di Kelurahan Sukorejo sebagai lokasi penelitian yang dipilih, Penurunan jumlah KPM dari tahun ke tahunnya menunjukkan bahwa Program Raskinda Kota Blitar dapat dikatakan berhasil. Penurunan jumlah KPM tersebut dikarenakan banyak dari sebagian masyarakat miskin sudah mengalami perubahan dalam perekonomian yang jauh lebih baik. Selain itu juga penurunan jumlah KPM dikarenakan adanya masyarakat yang meninggal dan pindah domisili diluar Kecamatan Sukorejo atau diluar Kota Blitar. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Anang melalui pernyataannya yang menyatakan bahwa:

“jumlah penerima manfaat dari tahun ke tahunnya memang menurun, hal tersebut sesuai dengan harapan pemerintah yang menginginkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Menurunnya jumlah penerima raskinda menunjukan adanya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat.”

Indikator kinerja Program Raaskinda ditandai dengan tercapainya target 5 Tepat, yaitu; Tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Penjelasan dari target lima tepat sebagai berikut:

- 1) Tepat sasaran penerima manfaat: Raskinda hanya diberikan kepada penerima manfaat sesuai Surat Keputusan Walikota Blitar tentang Daftar Nama dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat Raskinda Kota Blitar
- 2) Tepat jumlah: jumlah beras Raskinda yang merupakan hak penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 10kg/KPM/bulan selama 12 bulan secara gratis
- 3) Tepat waktu: waktu pelaksanaan distribusi beras kepada penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi
- 4) Tepat administrasi: terpenuhinya persyaratan administrasi dan pertanggungjawaban secara benar, lengkap, dan tepat waktu
- 5) Tepat kualitas: terpenuhinya persyaratan kualitas beras sebagaimana spesifikasi dalam kontrak kerja

Hasil penelitian lapangan mengenai kelima indikator kinerja Program Raskinda, pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan ketentuan indikator kinerja program Raskinda. Akan tetapi terdapat satu indikator kinerja yang tidak sesuai dengan rencana program, yaitu indikator tepat waktu. Pelaksanaan penyaluran Raskinda kepada penerima manfaat mundur dari bulan yang sebelumnya sudah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan pada awal tahun 2017 (Januari-Maret) belum ada kepastian tentang pelaksanaan program BPNT yang merupakan pengganti program Raskin/Rastra pusat. Hal tersebut



dijelaskan oleh Bapak Jito (wawancara tanggal 6 Juni 2018 pukul 12.30

WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Blitar), sebagai berikut:

“program Raskinda ini sudah berjalan sesuai dengan indikator kinerja, mulai dari tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat administrasi. Tepat kualitas ini ya mbak berasnya menggunakan beras nomer 1, beda sekali kualitasnya sama beras bantuan dari pemerintah pusat. Terus ada satu indikator yang kurang tepat mbak tepat waktu. Pada tahun 2017 ada keterlambatan dalam menyalurkan soalnya datanya belum pasti untuk siapa yang menerima, nunggu data penerima BPNT dulu baru bisa memproses siapa saja yang dapat Raskinda”

Dari hasil wawancara dilapangan menunjukan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Blitar sudah sesuai yang ditetapkan, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan sasaran yang telah dicapai adalah penurunan jumlah penerima manfaat disetiap tahunnya. Selain itu juga terdapat keterlambatan penyaluran bantuan pada tahun 2017 dikarenakan belun adanya kepastian jumlah data penerima BPNT data pusat yang data tersebut merupakan acuan dari data yang digunakan pemerintah Kota Blitar untuk menentukan jumlah penerima Program Raskinda. Hal tersebut karena KPM program Raskinda merupakan masyarakat miskin yang ada di Kota Blitar yang tidak tercover oleh bantuan yang diberikan oleh pusat.

#### **d. Indikator Dampak (*outcome*)**

Indikator dampak (*outcome*) merupakan hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka panjang. Harapan pemerintah Kota Blitar



dengan adanya Program Raskinda ini adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar terutama masyarakat miskin dan janda miskin yang tidak tercover dari bantuan pusat, agar tidak ada ketimpangan sosial yang nyata. Dengan adanya bantuan Raskinda berupa pemberian bantuan beras secara gratis guna mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan pemberian beras 10kg setiap bulannya secara gratis, pemerintah berharap uang yang seharusnya digunakan untuk membeli beras dapat digunakan untuk kebutuhannya yang lainnya.

Hasil penelitian yang ada dilapangan pemerintah Kota Blitar mengharapkan adanya perubahan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah dengan adanya pengurangan beban pengeluaran masyarakat dalam pemenuhan pangan dapat digunakan untuk hal lain seperti, menambah pendapatan, keadaan rumah yang lebih baik, terpenuhinya sandang, kesehatan, dan pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Jito (wawancara tanggal 6 Juni 2018 pukul 12.30 WIB di kanroe Dinas Sosial Kota Blitar) sebagai berikut:

“Program Raskinda ini kan ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu sudah terwujud mbak. Sekarang gini mbak masyarakat kurang mampu dapat beras 10kg/ tiap bulan secara gratis. Uang yang seharusnya dibuat beli beras bisa dibuat beli yang lainnya, bisa buat bayar yang lain. Sekarang sekolah SMA di Blitar kan bayar, nah orang tua yang punya anak yang masih SMA bisa bayar SPP pakek uang yang seharusnya buat beli beras.”

Masyarakat selaku penerima program Raskinda sangat merasakan dampak dari adanya program tersebut. Dengan adanya program

Raskinda pengeluaran yang biasanya digunakan untuk membeli beras dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan pemerintah dengan adanya program Raskinda. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang berikan oleh Bapak Suyadi selaku penerima Raskinda (wawancara tanggal 13 Juni 2018 Pukul 15.00 WIB di Jalan Jati RT 1 RW 13 kelurahan Sukorejo), sebagai berikut:

“menurut saya ya mbak program ini bisa menyisihkan uang yang buat beli beras bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Program ini sangat membantu bagi keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan peneliti diatas, bahwa setelah adanya program Raskinda yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Kota Blitar semakin meningkat. Masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut dapat menggunakan uang yang digunakan untuk membeli beras diganti untuk keperluan yang lainnya. Hal tersebut membuat apa yang diharapkan dari adanya program Raskinda oleh pemerintah dapat terwujud dengan baik.

## **2) Program Raskinda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar**

Program Raskin/Rastra Daerah dilaksanakan dalam rangka memberikan kontribusi nyata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Blitar guna menutupi kesenjangan antara data keluarga penerima manfaat BPNT yang bersumber dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dengan rumah tangga miskin dan fakir miskin yang ada di lapangan, dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari pengamalan Pancasila dalam rangka membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kegiatan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya bagi keberlangsungan hidup keluarga penerima manfaat.

Harapkan pemerintah dengan adanya program ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kenyataannya sudah sesuai harapan yang diinginkan. Dengan adanya program Raskinda tersebut kesejahteraan masyarakat di Kota Blitar dapat terwujud. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan

Mempunyai pendapatan disini maksudnya dengan adanya bantuan berupa beras gratis dari pemerintah Kota Blitar, uang yang seharusnya digunakan untuk membeli beras dapat digunakan untuk modal tambahan jika mempunyai usaha atau membuat usaha baru guna mendapatkan pendapatan tambahan. Dengan itu maka masyarakat yang diberikan bantuan dapat mempunyai pendapatan tambahan. Dengan adanya tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Hasil penelitian dilapangan masyarakat yang mendapat bantuan tersebut mendapat tambahan pendapatan dari hasil menyisihkan uang beras yang tidak digunakan, yang kemudian dijadikan modal untuk tambahan modal usaha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Suyadi selaku penerima manfaat (wawancara tanggal 13 Juni 2018 pukul 15.00 WIB di jalan Jati RT 1RW 13) sebagai berikut:

“saya dapat bantuan dari pemerintah ini sangat membantu mbak, uang yang seharusnya buat beli beras bisa digunakan untuk hal lain mbak. Saya jualan nasgor berasnya bisa saya jual mbak kadang buat bahan nasgor, untungnya jadi nambah pendapatannya ya jadi nambah”

Hasil wawancara diatas memperlihatkan bahwa dengan adanya program Raskinda ini masyarakat mendapatkan pendapatan tambahan sehingga kesejahteraan keluarga menjadi lebih baik lagi. Dengan meningkatnya kesejahteraan tersebut maka kemiskinan akan berkurang.

b. Terpenuhi Pangan

Terpenuhi pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan masyarakat hidup sejahtera atau tidak. Sesuai dengan tujuan dari program Raskinda yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam hal kebutuhan pangan. Dengan adanya program Raskinda masyarakat sangat terpenuhi kebutuhan pangannya. Setiap bulan masyarakat menerima 10kg secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Dari hasil penelitian dilapangan masyarakat yang mendapat beras gratis setiap bulannya 10kg yang diberikan setiap empat bulan sekali ini merasakan dampak positif dari program tersebut. Masyarakat yang sebelumnya kekurangan tetapi belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat dengan adanya program ini bisa merasa kecukupan dalam hal pangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Yayuk Setiani penerima manfaat (wawancara tanggal 10 Juni 2018 pukul 15.00 di jalan Pamungkur No 54 RT 1 RW 3) sebagai berikut:

“bantuan yang dikasih pemkot itu banyak mbak 10kg tiap bulan, turah-turah mbak iku berase gawe sak kelurga. Ya lek dibuat makan ae yo terpenuhi”

Pernyataan serupa juga dibenarkan oleh Suyadi selaku penerima manfaat (wawancara tanggal 13 Juni 2018 pukul 15.00 WIB di jalan Jati RT 1RW 13) sebagai berikut:

“program bantuan dari pereintah sangat membantu mbak gawe memenuhi pangan ae. Kan tiap bulane dijatah 10kg gratis, tapi lek bagi 4 bulan pisan. Lek diitung-itung yo sangat cukup lek gawe maem sak keluarga”

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa program Raskinda sangat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat yang menerima. Kebutuhan pangan yang merupakan hal pokok bagi keluarga bisa terpenuhi atau bahkan bisa berlebih jika dalam satu keluarga hanya terdiri dari dua atau tiga orang saja sedangkan beras yang diberikan setiap bulannya sebanyak 10kg. Kebutuhan pangan yang terpenuhi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Jadi, jika hal tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan keluarga tersebut sejahtera.



c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator dalam kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu modal manusia yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi suatu bangsa. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyambung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Suyadi selaku penerima manfaat (wawancara tanggal 13 Juni 2018 pukul 15.00 WIB di jalan Jati RT 1RW 13) sebagai berikut:

“pendapatan seng tak oleh saiki lumayan mbak isok tak gawe bayar uang kesehatan, ditabung lek sak wayah-wayah loro gak bingung. Lek wonge sehat isok nyambut gawe terus isok nyukupi kebutuhan keluarga, gak kekurangan.”

Indikator keberhasilan program pembangunan sosial ekonomi adalah peningkatan usia harapan hidup penduduknya. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup Kota Blitar memiliki

kecenderungan meningkat pada setiap tahunnya. Bahkan angka harapan hidup Kota Blitar selalu terlihat paling tinggi apabila dibandingkan dengan angka nasional maupun Jawa Timur. Pada tahun 2016, angka harapan hidup Kota Blitar sebesar 72,09 artinya rata-rata perkiraan umur yang dapat ditempuh masyarakat Kota Blitar sejak lahir adalah 73-74 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya pembangunan kesejahteraan di Kota Blitar.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal penting bagi semua orang. Terpenuhi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan saat ini sangat diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan berpendidikan kita dapat mengubah kehidupan yang awalnya tidak layak menjadi layak, yang awalnya belum dapat dikatakan sejahtera menjadi lebih sejahtera. Program Raskinda ini juga berpengaruh dalam hal pendidikan. Hal tersebut dikarenakan uang yang seharusnya digunakan untuk dibelanjakan beras dengan bantuan beras gratis dari pemerintah Kota Blitar uangnya dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan. Bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai anak yang masih

sekolah sangatlah membantu, apalagi masyarakat yang mempunyai anak yang masih sekolah di bangku SMA, karena SMA yang ada di Kota Blitar saat ini sudah tidak dikenakan sekolah gratis sehingga setiap bulannya harus membayar SPP. Dengan adanya program Raskinda ini sangat membantu dalam hal pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Widji Astutik selaku penerima beras Raskinda (wawancara tanggal 10 Juni 2018 pukul 09.00 ) sebagai berikut:

“saya dapet bantuan dari pemerintah beras 10kg setiap bulannya, uang yang buat beli beras bisa tak buat bayar uang sekolah anak saya mbak, opo maneh ini kan sekolah SMA saiki bayar wes gak gratis maneh koyok biyen”

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Yayuk Setiani penerima manfaat (wawancara tanggal 10 Juni 2018 pukul 15.00 di jalan Pamungkur No 54 RT 1 RW 3) sebagai berikut:

“lumayan lo mbak beras gratis dari pemkot iku. Tiap bulane 10kg kan, dadi duwit gawe tuku beras iso gawe bayar les anak mbak ben tambah pinter gak koyok bapak ibu e”

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa program Raskinda yang ada di Kota Blitar sangat memeberikan manfaat bagi masyarakat yang menerimanya, terlebih dalam hal pendidikan. Pendidikan yang terpenuhi dengan baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat lebih baik lagi.

### C. Analisa Data

## 1) Evaluasi Program Raskinda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar

### a. Indikator Masukan (*Input*)

Latar belakang adanya program Raskinda adalah sebagai upaya untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam hal pemenuhan pangan. Program Raskin dan Bantuan Pangan Non tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan salah satu perwujudan kebijakan guna menanggulangi kemiskinan dinilai sangat mempunyai kesamaan dengan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar untuk menentukan kemiskinan. Sehingga pemerintah Kota Blitar melaksanaka Program Raskinda yang diberikan untuk penerima manfaat secara gratis. Hal tersebut dikarenakan daya beli masyarakat miskin yang ada di Kota Blitar masih sangat rendah. Selain itu juga untuk menutupi kesenjangan antara data rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM) 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dengan keluarga miskin dan fakir miskin yang riil di lapangan.

Raskinda di Kota Blitar diberikan kepada keluarga miskin dan fakir miskin yang tidak tercover melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai dari pemerintah Pusat. Selain itu juga bagi KPM Rastra yang tidak terdata pada program BNPT tetapi tidak memiliki Kartu KKS/PBI-JKN/KIP, apabila dinilai layak melalui proses muskel dapat

diusulkan sebagai penerima Raskin Daerah. Kedua hal tersebut masuk kedalam kriteria keluarga penerima.

Program Raskinda Kota Blitar memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dari program Raskin Daerah Kota Blitar adalah mengurangi beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dan sasaran dari program tersebut adalah berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat melalui pemberian beras daerah secara gratis dengan alokasi sebanyak 10kg/KPM/bulan selama 12 bulan, dengan sasaran KPM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar.

Program Raskinda yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan dalam menentukan KPM yang dilakukan oleh ketua RT pada saat pendataan. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurang pahamnya Ketua Rt dalam hal mendata calon KPM. Masih terdapat keluarga yang mampu tetapi masih mendapatkan bantuan, hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Blitar.

Mengenai tujuan dan sasaran dari program Raskinda yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar jika dilihat dari hasil penelitian dilapangan, sudah sesuai atau sudah tercapai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh pemerintah Kota Blitar. Tujuan yang sudah tercapai adalah mengurangi beban pemenuhan kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan



pangan pokok berupa beras. Kemudian sasaran yang telah dicapai adalah berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat melalui pemebrian beras secara gratis setiap bulannya sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya selama 1 tahun.

Evaluasi program merupakan penilaian yang diberikan ketika program sudah berjalan. Menurut Beni Setiawan, (1999: 20) evaluasi program diawali dengan apa yang menjadi masukan (input) dari program Raskinda tersebut. Jika dilihat dari hasil pengamatan yang ada di lapangan apa yang menjadikan masukan untuk program sudah sesuai dengan latar belakang dari adanya program tersebut, walaupun dalam pendataan masih terdapat permasalahan yang dilakukan oleh ketua RT. Tetapi jika dilihat dari tujuan dan sasran yang telah ditetapkan, pelaksanaan program Raaskinda yang ada di Kecamatan Sujorejo sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kesalahan yang terjadi dikarenakan belum adanya petugas dari pemerintah yang ditugaskan untuk mengecek secara langsung apakah masyarakat tersebut layak menerima atau tidak. Selama ini hanya ketua RT yang dipercaya untuk mengecek apakah masyarat itu berhak menerima atau tidak untuk diusulkan sebagai penerima manfaat karena dianggap lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya. Tetapi untuk tahun 2019 akan ada Pekerja Sosial Masyarakat yang akan turun langsung untuk mengecek apakah data penerima manfaat benar-benar pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Kesalahan dalam hal pendataan sangat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal penyaluran Program Raskinda. Jika terdapat kesalahan maka tidak sesuai dengan latar belakang dari adanya program Raskinda, yaitu memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan fakir miskin yang tidak tercover melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai dari pemerintah Pusat.

#### **b. Proses (*Process*)**

Program Raskinda terdapat dua proses yaitu penetapan penerima manfaat dan tahapan pelaksanaan Raskinda secara umum. Dalam proses penetapan penerima manfaat Tim Pelaksana dan Koordinasi Raskin Daerah di masing-masing Kecamatan/Kelurahan perlu mengadakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal terhadap calon penerima manfaat program Raskin Daerah.

Dari hasil pengamatan di lapangan mukel yang dilakukan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Muskel dilaksanakan secara transparan dan partisipatif yang dipimpin oleh lurah yang dihadiri aparat Kelurahan (termasuk RT dan RW) TKSK, LPMK, tokoh masyarakat, perwalikan keluarga miskin dan fakir miskin calon penerima manfaat. Dari hasil muskel tersebut diperoleh data calon penerima program yang dimasukkan kedalam Berita Acara Penetapan dan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin Daerah yang ditanda tangani oleh lurah dan disahkan oleh camat, untuk

kemudian digunakan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Kepala Kecamatan (camat).

Selain tahapan penetapan surat keputusan tentang daftar nama dan alamat KPM, juga terdapat tahapan pelaksanaan Program Raskin/Rastra secara umum. Pada pelaksanaan program Raskin/Rastra Daerah pada tahun 2017, bahwa untuk pengelolaan kegiatan secara teknis yang sebelumnya berada di kecamatan, saat ini pengelolaanya telah beralih ke Dinas Sosial Kota Blitar, sedangkan regulasi dan kebijakan program tetap dilaksanakan melalui tim sekretariat daerah melalui Bagian Perekonomian dan Kesra. Pengelolaan program Raskinda Kota Blitar bersamaan dengan pengelolaan program BPNT oleh pemerintah pusat sehingga pelaksanaan program Raskin/Rastra Daerah tentu juga mengalami keterlambatan karena keterkaitan dengan kepastian penggunaan datanya. Dari hasil penelitian di lapangan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Program Raskinda secara umum.

Proses penentuan KPM dan tahapan-tahapan pelaksanaan Program Raskinda termasuk kedalam proses kebijakan. Dalam evaluasi program proses juga merupakan tahapan dari sebuah kebijakan sehingga perlu dilakukan evaluasi. Menurut Beni Setiawan, (1999: 20) evaluasi dapat diukur salah satunya pada dimensi proses. Dari pengamatan yang telah dilakukan di Kecamatan Sukorejo terdapat kesalahan dalam menentukan KPM pada level RT, karena masih kurangnya pemahaman dalam hal penentuan calon KPM. Terdapat Ketua RT yang mencalonkan

KPM tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis pelaksanaan Program Raskinda. Tetapi dalam proses tahapan-tahapan pelaksanaan Program Raskinda sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau sudah sesuai dengan alurnya. Terkecuali pada saat tahun 2017 bahwa untuk pengelolaan kegiatan secara teknis yang sebelumnya berada di kecamatan, saat ini pengelolaanya telah beralih ke Dinas Sosial Kota Blitar, sedangkan regulasi dan kebijakan program tetap dilaksanakan melalui tim sekretariat daerah melalui Bagian Perekonomian dan Kesra.

#### **c. Keluaran (Output)**

Pelaksanaan program Raskinda dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Blitar guna menutupi kesenjangan antara data keluarga penerima manfaat BPNT yang bersumber dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BPDT) 2015 dengan rumah tangga yang kurang mampu yang ada riil di lapangan. Dari kegiatan tersebut pemerintah Kota Blitar mempunyai tujuan dan sasaran dari Program Raskinda tersebut. Tujuan dari program Raskinda adalah mengurangi beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sedangkan sasaran dari program Raskinda adalah berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemberian beras daerah secara gratis dengan alokasi

sebanyak 10kg/ KPM/ bulan selama 12 bulan, dengan sasaran KPM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar

Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah Kota Blitar berupa beras gratis yang diberikan setiap 4 bulan sekali sebanyak 10kg setiap bulannya. Kemudian dari sasaran yang ditetapkan terdapat penurunan jumlah penerima manfaat dari tahun ketahunnya. Hal tersbeut dikarenakan ada beberapa msyarakat yang perekonomiannya menjadi lebih baik, sehingga dianggap sudah mampu dan tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Hasil penelitian dalam hal indikator kinerja program Raskinda yaitu tercapainya target 5 Tepat, yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi juga sudah berjalan dengan yang telah ditentukan, walaupun dari hal tepat waktu masih terdapat masalah dikarenakan terjadi keterlambatan penyaluran pada tahun 2017. Keterlambatan tersebut dikarenakan belum adanya kepastian tentang pelaksanaan program BPNT yang merupakan pengganti program Raskin/Rastra pemerintah pusat. Sehingga berpengaruh terhadap rencana program raskinda. Walaupun ada keterlambatan dalam penyaluran program tetapi program Raskinda teteap berjalan dengan baik.



Evaluasi program menurut Beni Setiawan, (1999: 20) Output atau keluaran dari suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan salah satu dimensi yang digunakan dalam mengevaluasi program. Output atau keluaran yang dimaksud adalah tujuan dan sasaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan tujuan dan sasaran yang diinginkan dari Program Raskinda ini sudah tercapai. Selain dilihat dari tujuan dan sasaran juga dilihat dari ketercapaian target yang telah ditetapkan, yaitu mengenai target 5 tepat. Kelima target yang telah ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan target, walaupun ada satu target yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tepat waktu. Hal tersebut bukan merupakan kesalahan pemerintah Kota Blitar tetapi memang ada perubahan data yang digunakan dalam menentukan KPM. Dengan ketercapaian tujuan dan sasaran program serta tercapainya 5 target tepat yang telah ditetapkan maka dapat dinilai bahwa program Raskinda sudah baik dalam pelaksanaannya.

#### **d. Indikator Dampak (Outcome)**

Program Raskinda yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Blitar diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Blitar. Indikator dampak disini merupakan hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka panjang. Dampak yang diharapkan pemerintah dari adanya program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ada Kota Blitar.

Hasil penelitian dilapangan pemberian bantuan beras secara gratis sebesar 10kg setiap bulannya yang diberikan setiap empat bulan sekali ini sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya bantuan tersebut pengeluaran masyarakat yang seharusnya digunakan untuk membeli beras guna memenuhi kebutuhan pangan, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan yang dapat dipenuhi adalah menambah pendapatan, keadaan rumah yang lebih baik, terpenuhinya sandang, kesehatan, dan pendidikan. Dengan terpenuhinya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga. Kualitas pendidikan, kesehatan, sandang, dan keadaan rumah yang lebih baik merupakan dampak yang diberikan dari adanya program Raskinda Kota Blitar.

Evaluasi program merupakan penilaian yang diberikan ketika program sudah berjalan. Menurut Beni Setiawan (1999:20) Evaluasi terhadap dampak yang diberikan juga masuk kedalam dimensi untuk menilai suatu program. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu dengan adanya program Raskinda adalah tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik atau meningkat. Hal tersebut sudah sesuai dengan dampak yang diharapkan oleh pemerintah Kota Blitar dengan adanya program Raskinda yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2) Program Raskinda dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar

Pelaksanaan Program Raskinda merupakan kontribusi nyata guna menutupi kesenjangan antara data keluarga peneriman manfaat BPNT dengan rumah tangga miskin yang riil yang ada dilapangan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar. Program Raskinda ini diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat yang menerima dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesehateraan masyarakat yang digunakan adalah mempunyai pendapatan, terpenuhinya pangan, keadaan rumah, terpenhinya sandang, kesehatan, dan pendidikan. Adapaun pnejelasanya sebagai berikut:

### a. Meningkatkan pendapatan

Program Raskinda yang diberikan pemerintah Kota Blitar yang mengharapkan dengan adanya program ini kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Blitar dapat meningkat telah dirasakan oleh masyarakat yang menerima bantuan. Bantuan tersebut dapat juga mempengaruhi atau memberi dampak terhadap pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Bantuan tersebut berupa pemberian beras sebanyak 10kg setiap bulannya secara gratis dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dapat digunakan oleh masyarakat untuk menambah modal usahanya. Dengan bertambahnya modal usaha dapat memberikan kenaikan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat.

Bertambahnya jumlah pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat dapat menjadi nilai positif bagi program Raskinda yang telah berjalan selama ini. Salah satu tingkat penentu kesejahteraan adalah meningkatkan pendapatan. Menurut Soekartawi (1987) perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang akan dikonsumsi, pada tingkat pendapatan rumah tangga yang rendah, maka pengeluaran rumah tangganya lebih besar dari pendapatannya. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah sudah dirasakan oleh masyarakat salah satunya dengan bertambahnya jumlah pendapatan. Harapan yang diinginkan oleh pemerintah sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat dinilai bahwa program ini sudah berjalan sesuai harapan yang diinginkan oleh pemerintah.

b. Terpenuhinya pangan

Program Raskinda memiliki tujuan yaitu mengurangi beban pengeluaran pangan bagi masyarakat penerima manfaat. Dengan tujuan yang diharapkan pemerintah tersebut masyarakat merasakan bahwa dengan adanya program Raskinda kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan jumlah bantuan yang diberikan cukup banyak sebesar 10kg setiap bulannya. Dengan jumlah bantuan seperti itu kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi.

Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya program Raskinda tersebut sudah sesuai dengan harapan. Menurut BKKBN (2010) masyarakat dapat makan dua kali sehari atau lebih dengan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi sebagai makanan pokoknya. Banyak masyarakat yang merasakan perubahan kesejahteraan dengan adanya bantuan tersebut. Kebutuhan pangan yang terpenuhi merupakan salah satu indikator dalam kesejahteraan masyarakat. Dilihat dilapangan bahwa masyarakat merasa dengan adanya bantuan Raskinda yang diberikan secara gratis dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan. Hasil bahasan menunjukan bahwa Program Raskinda yang diberikan oleh pemerintah Kota Blitar untuk masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Blitar dapat dinilai baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal manusia yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi suatu bangsa. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu Negara/wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan penambahan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat



pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyambung terhadap pertemubuhan ekonomi.

Program raskinda merupakan salah satu program bantuan sosial ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Kota Blitar. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan program adalah peningkatan usia harapan hidup penduduknya. Salah satu latar belakang adanya program adalah meningkatkan daya beli masyarakat karena di Kota Blitar tingkat daya beli masyarakat masih tergolong rendah. Dengan adanya program Raskinda tersebut daya beli masyarakat menjadi meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat akan mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Dari hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa tingkat daya beli masyarakat meningkat dikarenakan uang yang seharusnya dibelikan untuk beras digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi angka harapan hidup yang merupakan salah satu indikator dalam hal kesehatan. Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan indikator BKKBN (2010). Dengan terpenuhinya tingkat kesehatan yang baik maka tingkat

kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat sesuai dengan harap pemerintah dengan adanya program tersebut.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan. Jenjang pendidikan yang dapat ditempuh oleh masyarakat dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan harapan pemerintah Kota Blitar dengan adanya Program Raskinda ini adalah terpenuhinya pendidikan. Terpenuhinya pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhannya lainnya salah satunya adalah pendidikan. Masyarakat dapat menggunakan uang tersebut untuk membayar SPP karena pada saat ini sekolah SMA yang ada di Kota Blitar sudah tidak mendapat lagi program sekolah gratis karena adanya peralihan kewenangan pendidikan dari tingkat kota ke provinsi. Atau bahkan dengan uang tersebut juga dapat digunakan untuk membayar les agar nilai siswa yang diperoleh menjadi lebih lebih baik.

Hasil penelitian dapat terlihat bahwa program Raskinda yang ada di Kota Blitar sangat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerimanya, terlebih dalam hal pendidikan. Pendidikan yang terpenuhi dengan baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat lebih baik lagi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Evaluasi Program Raskinda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar Studi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Meskipun terdapat banyak kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program Raskinda. Berikut adalah hasil termuan berdasarkan fokus penelitian:

##### 1. Evaluasi Program Raskinda di Kota Blitar

###### a. Indikator Masukan (*Input*)

Dilihat dari hasil pengamatan yang ada di lapangan apa yang menjadikan masukan untuk program sudah sesuai dengan latar belakang dari adanya program tersebut, walaupun dalam pendataan masih terdapat permasalahan yang dilakukan oleh ketua RT. Tetapi jika dilihat dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan program Raaskinda yang ada di Kecamatan Sujorejo sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tujuan yang sudah tercapai adalah mengurangi beban pemenuhan kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok berupa beras. Kemudian sasaran yang telah dicapai adalah

berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat melalui pemebrian beras secara gratis setiap bulannya sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya selama 1 tahun. Kesalahan yang terjadi dikarenakan belum adanya petugas dari pemerintah yang ditugaskan untuk mengecek secara langsung apakah masyarakat tersebut layak menerima atau tidak.

b. Proses (*Process*)

Pada pelaksanaan program Raskin/Rastra Daerah pada tahun 2017, bahwa untuk pengelolaan kegiatan secara teknis yang sebelumnya berada di kecamatan, saat ini pengelolaanya telah beralih ke Dinas Sosial Kota Blitar, sedangkan regulasi dan kebijakan program tetap dilaksanakan melalui tim sekretariat daerah melalui Bagian Perekonomian dan Kesra. Dari pengamanatan yang telah dilakukan di Kecamatan Sukorejo terdapat kesalahan dalam menentukan KPM pada level RT, karena masih kurangnya pemahaman dalam hal penentuan calon KPM. Terdapat Ketua RT yang mencalonkan KPM tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis pelaksanaan Program Raskinda. Tetapi dalam proses tahapan-tahapan pelaksanaan Program Raskinda sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau sudah sesuai dengan alurnya.

c. Keluaran (*Output*)

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan apa yang telah

direncanakan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah Kota Blitar berupa beras gratis yang diberikan setiap 4 bulan sekali sebanyak 10kg setiap bulannya. Kemudian dari sasaran yang ditetapkan terdapat penurunan jumlah penerima manfaat dari tahun ketahunnya.

Hasil penelitian dalam hal indikator kinerja program Raskinda yaitu tercapainya target 5 Tepat, yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi juga sudah berjalan dengan yang telah ditentukan, walaupun dari hal tepat waktu masih terdapat masalah dikarenakan terjadi keterlambatan penyaluran pada tahun 2017

d. Indikator Dampak (*Outcome*)

Dari hasil penelitian dilapangan pemberian bantuan beras secara gratis sebesar 10kg setiap bulannya yang diberikan setiap empat bulan sekali ini sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya bantuan tersebut pengeluaran masyarakat yang seharusnya digunakan untuk membeli beras guna memenuhi kebutuhan pangan, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan yang dapat dipenuhi adalah menambah pendapatan, keadaan rumah yang lebih baik, terpenuhinya sandang, kesehatan, dan pendidikan. Dengan terpenuhinya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat



## 2. Program Raskinda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Blitar

Program Raskinda ini diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat yang menerima dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan, yaitu:

### 1) meningkatkan pendapatan

Program Raskinda dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarena dengan adanya program Raskinda jumlah pendapatan menjadi meningkat. Harapan yang diinginkan oleh pemerintah sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat dinilai bahwa program ini sudah berjalan sesuai harapan yang diinginkan oleh pemerintah.

### 2) terpenuhinya pangan

Program Raskinda yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar dapat meningkatkan kesejahteraan msyarakat. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan pangan kelurga tidak mampu terpenuhi. Terpenuhinya pangan merupakan indikator dari kesejahteraan masyarakat.

### 3) Kesehatan

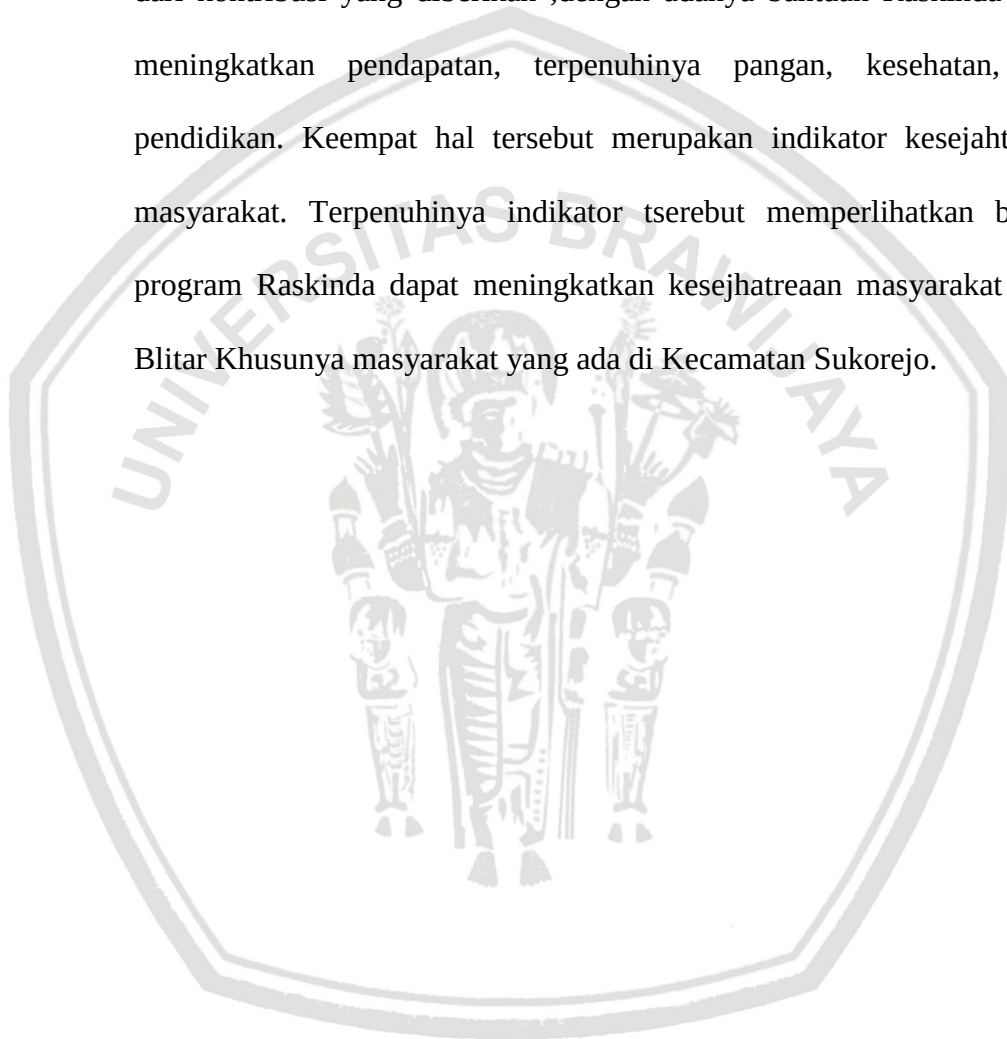
Terpenuhinya tingkat kesehatan yang baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya program tersebut.

### 4) pendidikan.

Hasil penelitian dapat terlihat bahwa program Raskinda yang ada di Kota Blitar sangat memeberikan manfaat bagi masyarakat yang

menerimanya, terlebih dalam hal pendidikan. Masyarakat dapat menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli beras dapat digunakan untuk membayar kebutuhan dalam hal pendidikan.

Hasil penelitaian dilapangan menunjukan bahwa dengan adanya program Raskinda kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan ,dengan adanya bantuan Raskinda yaitu meningkatkan pendapatan, terpenuhinya pangan, kesehatan, dan pendidikan. Keempat hal tersebut merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Terpenuhinya indikator tserebut memperlihatkan bahwa program Raskinda dapat meningkatkan kesejhatreaan masyarakat Kota Blitar Khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Sukorejo.



## B. Saran

Guna untuk meningkatkan pelaksanaan program Raskinda di Kecamatan Sukorejo dapat digunakan sebagai upaya perbaikan. Menurut Penulis upaya yang dapat dilakukan melalui:

1. Program Raskinda masih perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Blitar. Hal tersebut karena masih banyak terdapat masyarakat miskin yang belum tercover bantuan dari Pemerintah Pusat.
2. Memberikan pemahaman kepada warga masyarakat melalui RT/RW/kelurahan masing-masing bahwa program Raskinda diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan kriteria kemiskinan (rumah tangga miskin rentan) yaitu keluarga miskin, fakir miskin, dan bagi janda miskin.
3. Perlunya kroscek data oleh petugas yang membidangi guna mendapatkan data yang konkrit dan akurat.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi terhadap adanya perubahan data dan segera melaporkan kepada tim Koordinasi Raskinda tingkat Kota Blitar agar permasalahan data dapat segera diselesaikan.
5. Pemerintah Kota Blitar membuat kriteria masyarakat miskin yang seharusnya mendapat Raskinda secara pasti, agar Ketua RT memiliki dasar yang pasti dalam menentukan calon penerima Raskinda, sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan permasalahan mengenai tidak tepatnya sasaran penerima Raskinda.

6. Program Raskinda memberi manfaat dan berkontribusi yang positif bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu perlu adanya pengawasan yang lebih mendalam lagi guna memantau perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika terdapat masyarakat yang kesejahteraannya sudah baik, maka tidak perlu mendapatkan Raskinda untuk tahun berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Abdullah, Syukur. 1998. *Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto suharsimi dan Abdul Jabar Cepi Safrudin. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan edisi ke 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi, dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin. 2004/2014. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Renike Cipta.
- Bintarto, 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fitpatrick, Jody L, et al. 2004. *Program Evaluation: alternative Approaches and Practical Guideline. 3<sup>rd</sup> edition*. USA: Pearson Education Inc.
- Hakim, EM Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Arru Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, Fuat. 2012. Evaluasi pelaksanaan Program Pendampingan Pendidikan KEjuruan Direktorat Pembinaan SMK (Studi Kasus Universitas Sebelas Maret). Tesis Program PascaSarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI.
- Islamy, Irfan M. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, C.O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Polcy)*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Penerbit UI.



- Maraya, Satriana. 2011. *Evaluasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Reguler Di Uptp Balai Latihan Kerja Industri Makasar*, SKripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin.
- National Minority AIDS Council. 2009. *Program Evaluation: Technical Assistace, Training and Treatment Division*. Washington DC.
- PK2 KP. 2004. *Pedoman Umum*. Jakarta.
- Saphiro, Janet. 2001. *Monitoring and Evaluation CIVICUS World Aliance for Citien Partisipation*. Newtown Johannesburg South Africa.
- Setiawan, Beni. 1999. *Agenda Pendidikan Nasioanal*. Yogyakarta: Ar-Rus Media.
- Shadily dan Echols. 2000. *Kamus Terjemahan Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: UI-PRES.
- Suharto, Edi. 2005 *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, Oteng. 2000. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis untuk Professional*. Bandung: Angkasa.
- Syawie, Mochamad. 2011. "Kemiskinan dan Kesenjangan", *Informasi*, Vol.16 No.03 Tahun 2011.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasioal.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Yunanda, Ari. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan pada Pendidikan Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6723/UN10.F03.11.11/ PN/2018  
Lampiran : -  
Hal : Riset / Survey  
  
Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Jl. Anjasmoro No. 53  
Kota Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan untuk melakukan riset / survey bagi mahasiswa:

Nama : Fahma Nur Aini  
Alamat : Jl. Winong No. 04 Plosokerep Kota Blitar  
NIM : 145030101111004  
  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) Tahun 2015 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)  
  
Lamanya : 3 (Dua) Bulan  
Peserta : 1 (Satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.



Malang, 23 Mei 2018

an, Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D

NIP 19670217 199103 1 010

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6723/UN10.F03.11.11/PN/2018  
Lampiran : -  
Hal : Riset / Survey

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Kota Blitar  
Jl. Merdeka No. 105, Kepanjenkidul  
Kota Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan untuk melakukan riset / survey bagi mahasiswa:

Nama : Fahma Nur Aini  
Alamat : Jl. Winong No. 04 Plosokerep Kota Blitar  
NIM : 145030101111004  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) Tahun 2015 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)  
Lamanya : 3 (Dua) Bulan  
Peserta : 1 (Satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 23 Mei 2018  
an Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Publik  
  
**Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D**  
NIP 19670217 199103 1 010

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6723 /UN10.F03.11.11/ PN/2018  
Lampiran : -  
Hal : Riset / Survey

Kepada : Yth. Dinas Sosial Kota Blitar  
Jl. Jawa No. 64A  
Kota Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan untuk melakukan riset / survey bagi mahasiswa:

Nama : Fahma Nur Aini  
Alamat : Jl. Winong No. 04 Plosokerep Kota Blitar  
NIM : 145030101111004

Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) Tahun 2015 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)  
Lamanya : 3 (Dua) Bulan  
Peserta : 1 (Satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.



Malang, 23 Mei 2018

Dekan

Kepala Jurusan Administrasi Publik

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D  
NIP 19670217 199103 1 010

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6723/UN10.F03.11.11/ PN/2018  
Lampiran : -  
Hal : Riset / Survey  
Kepada : Yth. Camat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar  
Gg. I No. 123 Sukorejo  
Kota Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan untuk melakukan riset / survey bagi mahasiswa:

Nama : Fahma Nur Aini  
Alamat : Jl. Winong No. 04 Plosokerep Kota Blitar  
NIM : 145030101111004  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) Tahun 2015 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)  
Lamanya : 3 (Dua) Bulan  
Peserta : 1 (Satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 23 Mei 2018

Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Drs. Andy Feffta Wijaya, MDA, Ph.D  
NIP. 19670217 199103 1 010

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

Jalan Anjasmoro No. 53 Blitar Telp./Fax (0342) 804063  
 email : bakesbangpol-pb@blitarkota.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

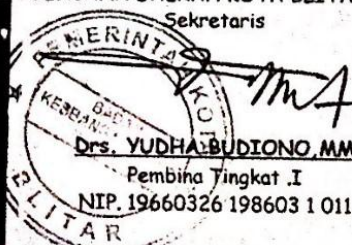
Nomor : 070 / 26 / 410.204/2018

**UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH**

- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 6723/UN10.F03.11.11/PN/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Observasi Penelitian/Data/Survey/Research
- Dengan ini menyatakan tidak keberatan Penelitian/Survey/Research/Riset/PKL dilakukan oleh :
- Nama : **FAHMA NUR AINI**
- NIM : 145030101111004
- Fakultas / Prodi : S1 Ilmu Administrasi Publik
- Alamat : Jl. Winong 04 RT.001 RW.002 Kel. Plosokerep Kec. Sananwetan Kota. Blitar
- Tempat Pelaksanaan : KESRA, DINSOS, KECAMATAN SUKOREJO
- Judul Proposal : **" Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) Tahun 2015 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar "(Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)**
- Waktu Pelaksanaan : 28 Mei s/d 28 Juli 2018
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research.
  2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
  3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
  4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
  5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 28 Mei 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN  
 BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN  
 BENCANA DAERAH KOTA BLITAR  
 Sekretaris



Tembusan : diSampaikan Kepada Yth

- ① Kabag Kesra Setda Kota Blitar
2. Kepala Dnas Sosial Kota Blitar
3. Camat Sukorejo Kota Blitar
4. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Univ Brawijaya
5. Yang Bersangkutan





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

Jalan Anjasmoro No. 53 Blitar Telp./Fax (0342) 804063  
 email : bakesbangpol-pb@blitarkota.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 / 201 / 410.204/2018

**UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH**

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 6723/UN10.F03.11.11/PN/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Observasi Penelitian/Data/Survey/Research  
 Dengan ini menyatakan tidak keberatan Penelitian/Survey/Research/Riset/PKL dilakukan oleh :

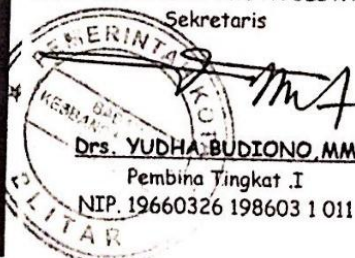
Nama : **FAHMA NUR AINI**  
 NIM : 145030101111004  
 Fakultas / Prodi : S1 Ilmu Administrasi Publik  
 Alamat : Jl. Winong 04 RT.001 RW.002 Kel. Plosokerep Kec. Sananwetan Kota. Blitar  
 Tempat Pelaksanaan : KESRA, DINSOS, KECAMATAN SUKOREJO  
 Judul Proposal : "Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) Tahun 2015 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar" (Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)  
 Waktu Pelaksanaan : 28 Mei s/d 28 Juli 2018

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 28 Mei 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN  
 BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN  
 BENCANA DAERAH KOTA BLITAR  
 Sekretaris



Tembusan : diSampaikan Kepada Yth

1. Kabag Kesra Setda Kota Blitar
- ② Kepala Dnas Sosial Kota Blitar
3. Camat Sukorejo Kota Blitar
4. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Univ Brawijaya
5. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

Jalan Anjasmoro No. 53 Blitar Telp./Fax (0342) 804063  
email : bakesbangpol-pb@blitarkota.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 / 2018 / 410.204/2018

**UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH**

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 6723/UN10.F03.11.11/PN/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Observasi Penelitian/Data/Survey/Research  
Dengan ini menyatakan tidak keberatan Penelitian/Survey/Research/Riset/PKL dilakukan oleh :

Nama : **FAHMA NUR AINI**

NIM : 145030101111004

Fakultas / Prodi : SI Ilmu Administrasi Publik

Alamat : Jl. Winong 04 RT.001 RW.002 Kel. Plosokerep Kec. Sananwetan Kota. Blitar

Tempat Pelaksanaan : KESRA, DINSOS, KECAMATAN SUKOREJO

Judul Proposal : " **Evaluasi Program Beras Miskin Daerah (Raskinda) Tahun 2015 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar**" (Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)

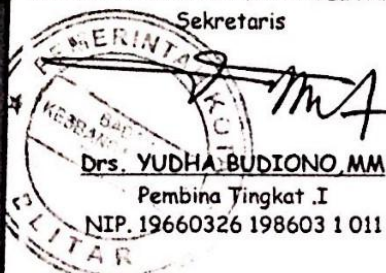
Waktu Pelaksanaan : 28 Mei s/d 28 Juli 2018

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 28 Mei 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA BLITAR  
Sekretaris



**Tembusan** : diSampaikan Kepada Yth

1. Kabag Kesra Setda Kota Blitar
2. Kepala Dnas Sosial Kota Blitar
- ③ 3. Camat Sukorejo Kota Blitar
4. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Univ Brawijaya
5. Yang Bersangkutan



## PEDOMAN WAWANCARA

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KABAG KESRA KOTA BLITAR

1. Apakah peran Kesra dalam program raskinda?
2. Bagaimana input dari Program Raskinda?
3. Apa yang menjadi alasan atau dasar adanya Program Raskinda?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskinda?
5. Siapa sasaran dari Program Raskinda?
6. Adakah kriteria tertentu untuk sasaran penerima Program Raskinda?
7. Apa tujuan dan manfaat dari adanya Program Raskinda?
8. Bagaimana proses pelaksanaan Program Raskinda?
9. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Program Raskinda?
10. Bagaimana hasil dari pelaksanaan Program Raskinda?
11. Apakah tujuan dan manfaat dari Program Raskinda tersebut tercapai?
12. Apakah yang menjadi kriteria keberhasilan Program Raskinda?
13. Apakah program tersebut telah berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan?
14. Apakah outcome yang didapat dari adanya program raskinda?
15. Adakah perubahan kesejahteraan masyarakat setelah adanya Program Raskinda?
16. Apakah yang menjadi pendukung dan penghambat outcome dari adanya program raskinda?
17. Bagaimana evaluasi Program Raskinda secara keseluruhan?
18. Apakah ada perbedaan pelaksanaan program pada setiap tahunnya?
19. Apakah ada criteria tertentu dalam menilai program tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak?



## PEDOMAN WAWANCARA

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

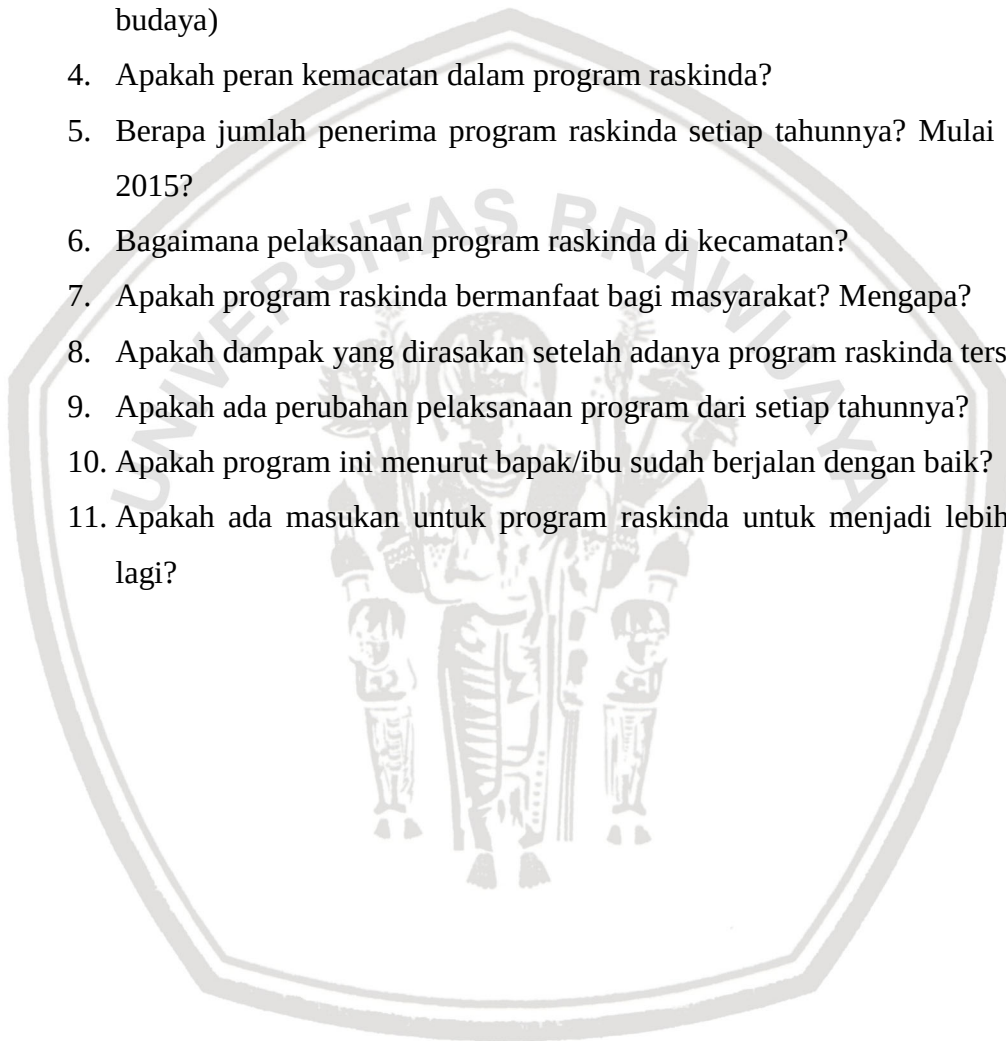
Rabu 6 juni

1. Apakah peran Dinas Sosial dalam program raskinda?
2. Siapa sasaran dari Program Raskinda?
3. Adakah kriteria tertentu untuk sasaran penerima Program Raskinda?
4. Bagaimana proses pelaksanaan Program Raskinda?
5. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Program Raskinda?
6. Bagaimana hasil dari pelaksanaan Program Raskinda?
7. Apakah yang menjadi kriteria keberhasilan Program Raskinda?
8. Apakah program tersebut telah berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan?
9. Apakah outcome yang didapat dari adanya program raskinda?
10. Adakah perubahan kesejahteraan masyarakat setelah adanya Program Raskinda?
11. Apakah yang menjadi pendukung dan penghambat outcome dari adanya program raskinda?
12. Bagaimana evaluasi Program Raskinda secara keseluruhan?
13. Apakah ada perbedaan pelaksanaan program pada setiap tahunnya?
14. Apakah ada criteria tertentu dalam menilai program tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak?

## PEDOMAN WAWANCARA

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KECAMATAN SUKOREJO

1. Bagaimana dan kapan kecamatan ini berdiri?
2. Bagaimana kondisi geografis dan demografis kecamatan ini?
3. Bagaimana karakteristik masyarakat daerah ini? (pendidikan, pekerjaan, budaya)
4. Apakah peran kecamatan dalam program raskinda?
5. Berapa jumlah penerima program raskinda setiap tahunnya? Mulai tahun 2015?
6. Bagaimana pelaksanaan program raskinda di kecamatan?
7. Apakah program raskinda bermanfaat bagi masyarakat? Mengapa?
8. Apakah dampak yang dirasakan setelah adanya program raskinda tersebut?
9. Apakah ada perubahan pelaksanaan program dari setiap tahunnya?
10. Apakah program ini menurut bapak/ibu sudah berjalan dengan baik?
11. Apakah ada masukan untuk program raskinda untuk menjadi lebih baik lagi?



## PEDOMAN WAWANCARA

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM RASKINDA

1. Sejak kapanakah bapak/ibu menerima program ini?
2. Bagaimana pelaksanaan program raskin selama ini?
3. Apakah ada dampak setelah menerima program ini?
4. Seberapa besar dampak yang dirasakan dari adanya program ini di keluarga bapak/ibu?
5. Dengan adanya program ini apakah kebutuhan pangan keluarga tercukupi?
6. Dengan adanya program ini apakah pengeluaran yang digunakan untuk membeli beras dapat digunakan untuk hal yang lain? Seperti meningkatkan kebutuhan sandang, memperbaiki keadaan rumah, kesehatan dan pendidikan?
7. Menurut bapak/ibu sebagai penerima program ini, apakah program ini sudah berjalan dengan baik?
8. Apakah ada masukan untuk pelaksanaan program ini agar menjadi lebih baik?

## HASIL PENELITIAN



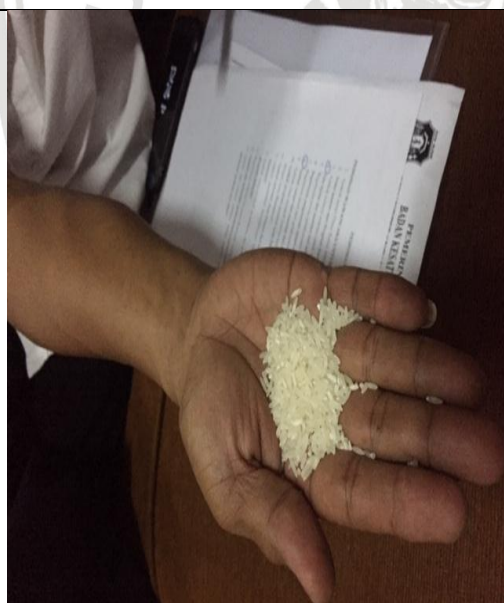
Gambar 1 : Foto Saat Wawancara dengan Bapak Anang Setiawan

Sumber : Data Primer Hasil Obeservasi 2018



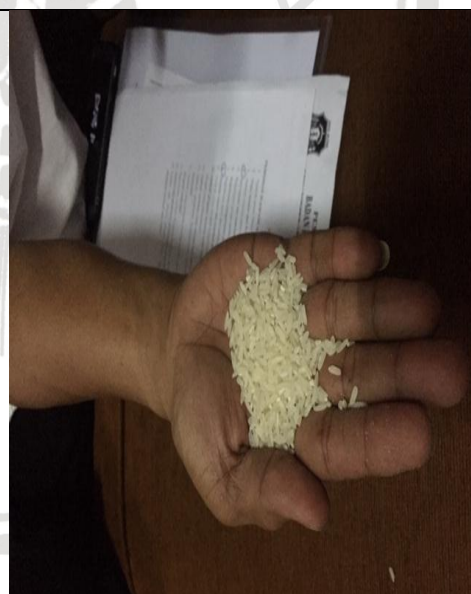
Gambar 2 : Foto Saat Wawancara dengan Bapak Jito Baskoro

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2018



Gambar 3 : Foto Beras Raskinda

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2018



Gambar 4 : Foto Beras Raskin Pusat

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2018





**Gambar 5 : Foto Saat Wawancara dengan Ibu Lilik**

**Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2018**



**Gambar 6 : Foto Saat Wawancara dengan Ibu Lilik**

**Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2018**

## CURRICULUM VITAE

## A. Identitas Diri

Nama : Fahma Nur Aini  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 30 Desember 1995  
 Umur : 22 Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl Winong No 4 Plosokerep Kota Blitar  
 NIM : 145030101111004  
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 No. Telepon : 085730989330  
 Alamat Email : [Fahmanuraini@gmail.com](mailto:Fahmanuraini@gmail.com)



## B. Riwayat Pendidikan

| No. | Pendidikan Formal                                                                         | Tahun     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | SDN Kepanjenkidul 3 Kota Blitar                                                           | 2002-2008 |
| 2.  | SMPN 1 Kota Blitar                                                                        | 2008-2011 |
| 3.  | SMAN 3 Kota Blitar                                                                        | 2011-2014 |
| 4.  | S1 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu<br>Administrasi Universitas Brawijaya Malang | 2014-2018 |